

**ANALISIS TINGKAT KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN
MAMMINASATA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Ekonomi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

OLEH:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

DWIYANI PUTRI LESTARI

10700113025

ALAUDDIN
MAKASSAR

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwiyani Putri Lestari

NIM : 10700113025

Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 23 Maret 1996

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

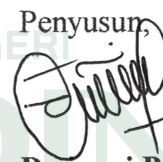
Alamat : Perum. Yusuf Bauty Garden A1 No 1

Judul : Analisis Tingkat Ketimpangan Pembangunan Di
Kawasan Mamminasata

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar dan hasil karya sendiri. Jika kemudian hari bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Desember 2017

Penyusun,



Dwiyani Putri Lestari
NIM: 10700113025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Analisis Tingkat Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Mamminasata”, yang disusun oleh **Dwiyani Putri Lestari** NIM: 10700113025, mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2017, bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ilmu Ekonomi (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 30 November 2017 M
11 Rabiul Awal 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara., M.Ag.	(.....)
Penguji I	: Dr. Siradjuddin, S.E., M.Si	(.....)
Penguji II	: Drs. Thamrin Logawali, M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Abdul Wahab, S.E., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Abdul Rahman, S.Pd., M.Si	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya. sehigga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dan salawat serta doa tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW umat beliau yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan ajarannya kepada seluruh umatnya. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Skripsi ini berjudul **“Analisis Tingkat Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Mamminasata”** telah diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orangtua tercinta, Ayahanda Didi Adiyanto dan Ibunda Sujiati Ningsih yang telah mendidik, membesarkan dengan penuh kasih sayang dan cintanya, yang tak pernah lelah bekerja keras demi membahagiakan anak-anaknya, dan tak pernah putus mendokan agar anak-anaknya menjadi wanita shaleha di dunia maupun akhirat. Dan juga Saudara saya Dewi Anggraeni, Dini Nurfitri Ana dan Defhita Sari yang menjadi pembangkit semangat setiap harinya.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini adalah atas izin Allah SWT sebagai pemegang kendali dan penulis sadar bahwa dalam proses penulisan

skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama, dari berbagai pihak dan sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi dan tidak lepas dari doa dan dukungan dari segenap keluarga besar penulis yang selalu percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas dan tulus akan membuahkan hasil yang indah. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor serta seluruh jajaran yang senantiasa mencurahkan dedikasinya dengan penuh keikhlasan dalam rangka pengembangan mutu dan kualitas UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Siradjuddin, SE., M.Si dan Hasbiullah, SE., M.Si. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala kontribusi, bantuan serta bimbingannya selama ini.
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, SE., M.Si selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Abdul Rahman, S.Pd., M.Si selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, masukan serta saran yang sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Siradjuddin, SE., M.Si selaku Penguji 1 dan Bapak Drs. Thamrin logawali, M.H. selaku penguji 2 yang telah memberikan masukan-masukan dan saran yang sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Aulia Rahman, SE., M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh staf Badan Pusat Statistik Indonesia, yang telah memberikan izin dan data untuk melakukan penelitian ini.
9. Kepada sahabat SMP penulis, Amel, Ikha, Dian, Aziza dan icha yang telah memberikan dukungan, semangat, kesetiaan, dan persaudaraanya selama ini.
10. Kepada sahabat SMA penulis, Nani, Biya, Nisa, Titin yang telah memberikan dukungan, semangat, kesetiaan, dan persaudaraanya selama ini.
11. Kepada Sahabat seperjuangan Ilmu Ekonomi A 013 terutama Irawati, Nurhikmah Risvi Said, Sri Rahayu Utami, Andi Abrianto, Erni Astuti, Nurul Hikmah Anwar, St. Febriyanti Saputri, Arniana, Nur Indasari, Rahmayanti Said, Muh. Hamid, Riska Aulia, Syarifuddin, dan teman-teman lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk 4 tahun yang penuh warna dan kasih sayang kalian tidak akan pernah penulis lupakan.

12. Sahabat Economics Study Club (ESC) Of UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
13. Teman dan staf tempat Magang penulis di Bappeda Provinsi Sulsel yang telah memberikan semangat, pembelajaran serta ilmu yang sangat berharga.
14. Sahabat KKN Angkatan 54 Posko 8 Desa Labbo Kabupaten Bantaeng: Enceng, Umami, Niar, Jojo, Aira, Mail, Diki, Agus dan Sahrul. Terima kasih atas doa dan dukungan serta telah mengajarkan sebuah arti persaudaraan, 2 bulan yang terindah adalah bersama kalian.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan penulis secara terkhusus. Penulis juga menyadari bahwa skripsi jauh dari kesempurnaan. Dengan segenap kerendahan hati, penulis berharap semoga kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Akhir kata penulis mengucapkan “WassalamuAlaikum. Wr.Wb”.

Gowa, November 2017

Penulis

DWIYANI PUTRI LESTARI

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Hipotesis	13
D. Definisi Operasional Variabel	14
E. Penelitian Terdahulu	16
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	23
BAB II TINJAUAN TEORITIS	24
A. Landasan Teori.....	24
1. Pembangunan Ekonomi	24
2. Pembangunan Ekonomi Daerah	25
3. Ketimpangan Pembangunan	28
4. Pertumbuhan Ekonomi	33
5. Aglomerasi	35
6. Desentralisasi Fiskal	36
7. Tingkat Pengangguran Terbuka	39
8. Hipotesis Kuznets	40
9. Pengaruh Antar Variabel	41
B. Kerangka Pikir	45

BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Pendekatan Penelitian.....	47
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	47
C. Jenis dan Sumber Data	47
D. Metode Analisis Data	48
E. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian	55
B. Deskripsi Antar Variabel	60
1. Ketimpangan Pembangunan	60
2. Aglomerasi	64
3. Desentralisasi Fiskal	66
4. Tingkat Pengangguran Terbuka	68
C. Hasil Pengolahan Data	70
1. Uji Asumsi Klasik	71
2. Analisis Regresi Linear Berganda	80
3. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi	83
4. Uji Hipotesis	84
5. Kurva U Terbalik	88
D. Pembahasan	91
1. Ketimpangan Pembangunan	91
2. Pengaruh Aglomerasi, Desentralisasi Fiskal, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Ketimpangan Pembangunan	93
3. Hipotesis Kuznets	97
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN	106
RIWAYAT PENULIS	

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Mamminasata Tahun 2004 – 2013	6
1.2 Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar Tahun 2009-2013	10
1.3 Total Penerimaan Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar Tahun 2009-2013	10
1.4 Penelitian Terdahulu	20
2.1 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi	37
4.1 Perkembangan Indeks <i>Entropy Theil</i> di Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar Tahun 2004 - 2015	61
4.2 Perkembangan Aglomerasi Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar Tahun 2004 - 2015	64
4.3 Perkembangan Desentralisasi Fiskal Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar Tahun 2004 - 2015	66
4.4 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar Tahun 2004 - 2015	68
4.5 <i>One- Sample Kolmogorov Smirnov-Test</i>	73
4.6 Uji Multikolinearitas	75
4.7 Uji Autokorelasi	77
4.8 Uji Autokorelasi	78
4.9 Hasil Analisis Regresi	81

4.10 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar Tahun 2004- 2015	88
4.11 Rata-rata Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Maminasata Tahun 2004-2015	90



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kawasan Mamminasata Tahun 2009-2013	7
2.1 Kerangka Pikir Penelitian	45
4.1 Grafik Histogram	72
4.2 Grafik Normal P-Plot	72
4.3 Uji Durbin Watson	77
4.4 Uji Heteroskedastisitas	79
4.1 Kurva Hubungan Antara Indeks <i>Entropy Theil</i> dan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Mamminasata	91

ABSTRAK

Nama : Dwiyani Putri Lestari

Nim : 10700113025

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Mamminasata

Ketimpangan merupakan permasalahan dalam proses pembangunan yang belum dapat dihapuskan terutama pada negara yang sedang berkembang. Kawasan Mamminasata memiliki ketimpangan yang mendekati tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar ketimpangan yang terjadi di Kawasan Mamminasata, serta menganalisis pengaruh variabel aglomerasi, desentralisasi fiskal dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pembangunan di Kawasan Mamminasata.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa runtun waktu (*time series*) dengan periode waktu 12 tahun (2004-2015). Teknik pengumpulan data adalah melalui studi pustaka. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi data panel. Tingkat ketimpangan pembangunan di kawasan Mamminasata diukur dengan indeks Entropy Theil, mengetahui pengaruh menggunakan analisis regresi berganda dan hipotesis kuznets menggunakan kurva u terbalik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Kawasan Mamminasata memiliki angka indeks Entropy Theil yang mendekati angka tinggi walaupun cenderung menurun setiap tahunnya di Kawasan Mamminasata, variabel aglomerasi memiliki hubungan yang positif, desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang positif dan tingkat pengangguran terbuka memiliki hubungan yang positif terhadap ketimpangan pembangunan.

Kata Kunci: Ketimpangan Pembangunan, Indeks *Entropy Theil*, Aglomerasi, Desentralisasi Fiskal, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Hipotesis Kuznets.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan menjadi suatu proses kegiatan yang dianggap penting dan wajib dilaksanakan oleh semua negara, karena globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan telah berdampak pada perubahan dalam semua aspek kehidupan manusia. Sehingga dalam proses pembangunan harus mencakup seluruh aspek baik ekonomi maupun sosial. Menurut Todaro (2006), menyebutkan bahwa pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik.

Pandangan ekonomi islam, titik berat dari pembangunan tidak terletak pada materi yang dimiliki oleh suatu negara ataupun individu. Ekonomi pembangunan dalam islam tidak hanya berpusat pada dunia namun juga pada akhirat, sehingga pembangunan tidak hanya dilihat dari materi yang merupakan ukuran dunia. Sesuai Firman Allah SWT QS Al-Imran 3:191:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka”.

Pada ayat 191 surah Al Imran menyatakan, dari kajian para ulama dapat dirumuskan dasar-dasar filosofi pembangunan ekonomi ini salah satunya tauhid. Filosofi ini mengandung implikasi bahwa alam semesta secara sadar di bentuk dan diciptakan oleh Allah Swt, karena itu tidak mungkin jagad raya ini muncul secara kebetulan.

Menurut Widiatri (2014) mengemukakan bahwa pembangunan wilayah dengan membentuk beberapa Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang menjadi ambisi untuk mengejar percepatan pembangunan ekonomi nasional tidak terlepas dari usaha pemerintah untuk mewujudkan komoditas yang dapat bersaing di pasar global. Pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata merupakan salah satu strategis untuk mengkondisikan terwujudnya percepatan pembangunan ekonomi melalui penyatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Makassar sebagai kawasan perkotaan inti, kawasan perkotaan Maros di kabupaten Maros, kawasan perkotaan Sungguminasa di Kabupaten Gowa, kawasan perkotaan Takalar di Kabupaten Takalar sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk kawasan megapolitan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Strategis Nasional Metropolitan Maminasata, dirumuskan wilayah Kota Makassar ditetapkan sebagai zona perencanaan dan menjadi pusat pertumbuhan dan tujuan pergerakan (PERPRES RI

No. 59 tahun 2011 tentang RTRW KSN Mamminasata). Dengan penetapan kota Makassar menjadi wilayah pusat pertumbuhan maka wilayah Kota Makassar menjadi pusat wilayah aglomerasi kegiatan ekonomi KSN Mamminasata.

Menurut Tarigan (2004) wilayah aglomerasi merupakan wilayah yang banyak memiliki fasilitas sehingga menjadi pusat daya tarik kegiatan-kegiatan penduduk. Hal tersebut menyebabkan perkembangan wilayah Kota Makassar pada umumnya lebih maju di bandingkan wilayah kabupaten lainnya dan hal tersebut akan menyebabkan daerah lain menjadi timpang. Apabila pertumbuhan hanya terpusat pada daerah-daerah pusat pertumbuhan saja maka *trickle down effect* (dampak penetasan kebawah) yang diharapkan akan sulit tercapai.

Terkonsentrasinya kegiatan ekonomi pada suatu daerah tertentu secara langsung berdampak pada ketimpangan pendapatan antar daerah sehingga tercipta kondisi dimana daerah yang menjadi pusat konsentrasi kegiatan ekonomi akan lebih mampu memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada masyarakatnya sehingga masyarakatnya relatif lebih makmur, sementara disisi lain daerah yang bukan merupakan pusat kegiatan ekonomi hanya mampu memberikan pendapatan yang rendah sehingga berakibat relatif rendah pula kemakmuran masyarakatnya.

Menurut Sjafrizal (2008) Ketimpangan pembangunan juga dapat dilihat secara vertikal yakni perbedaan pada distribusi pendapatan serta secara horizontal yakni perbedaan antara daerah maju dan terbelakang. Ketimpangan pada dasarnya disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini

kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan juga menjadi berbeda, oleh karena itu tidaklah mengherankan bilamana pada suatu daerah biasanya terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*). Sesuai Firman Allah SWT dalam QS Al-Hasyr 59:7 mengatakan:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Pada ayat ke 7 surah Al- Hasyr, salah satu aspek keadilan yang wajib ditegakan ialah keadilan dalam bidang ekonomi. Keadilan ekonomi pada prinsipnya ialah harta tidak boleh terkonsentrasi dan beredar hanya pada kelompok golongan kaya saja. Jika terjadi pemusatan kekayaan pada sekelompok orang, maka akan timbul ketimpangan sosial, akan terjadi kemiskinan dan proses pemiskinan.

Menurut Kuncoro (2004) Ketimpangan antar daerah seringkali menjadi masalah serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan beberapa hal misalnya kurangnya

sumber-sumber daya yang dimiliki, adanya kecenderungan penanam modal memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, juga tenaga kerja yang terampil. Disamping itu adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari pemerintah pusat kepada daerah juga dapat menyebabkan perbedaan kemajuan (pertumbuhan ekonomi) antardaerah.

Pelaksanaan pembangunan sangat sering mengalami perdebatan antara mengutamakan efisiensi dan pertumbuhan di satu pihak dengan efektivitas dan pemerataan dipihak lain. Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Akan tetapi pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi tidak selamanya diikuti pemerataan secara memadai.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat diharapkan pertumbuhan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Sejalan dengan Hipotesis Kuznet mengenai kurva U-Terbalik, dimana pada tahap-tahap pertumbuhan awal distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya hal tersebut akan membaik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana pada saat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah meningkat akan mengurangi ketimpangan di dalam wilayah tersebut, akan tetapi pertumbuhan ini harus diimbangi dengan pemerataan pendapatan per kapita bagi seluruh masyarakat daerah tersebut.

Angelia (2010) mengemukakan Pertumbuhan ekonomi diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan. Ekonomi suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak selamanya diikuti dengan pemerataan. Menurut BPS (2013), PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah, yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu waktu di wilayah tersebut. Adapun perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2000 kawasan Mamminasata dilihat pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 2000 Kota
Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten
Takalar Tahun 2004-2013

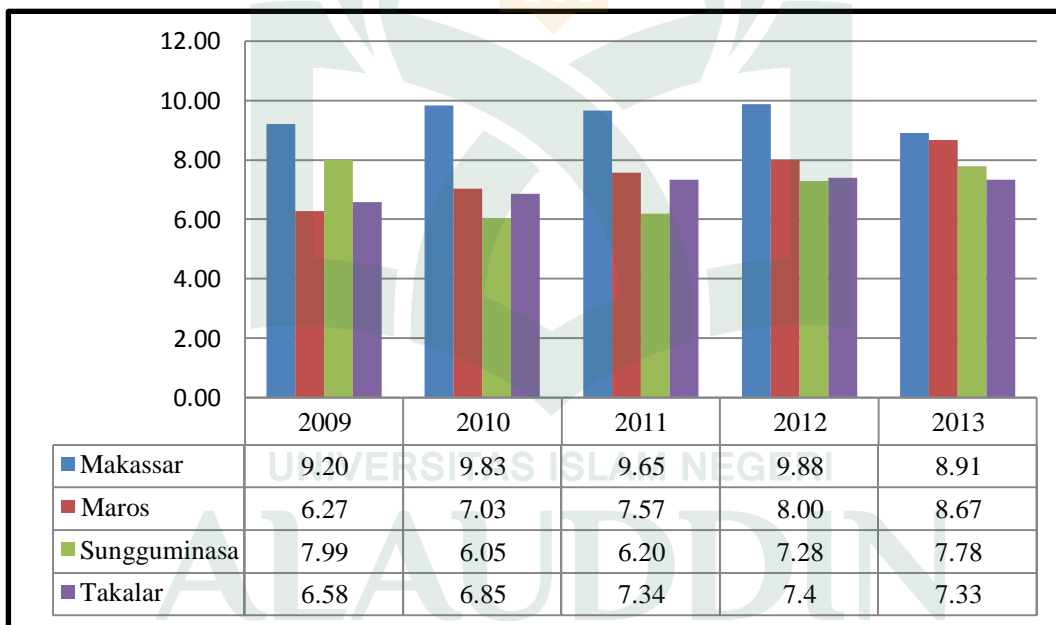
No	Tahun	PDRB (Juta Rupiah)			
		Makassar	Maros	Sungguminasa	Takalar
1	2004	9.791.709	853.288	1.294.783	635.647
2	2005	10.492.540	879.886	1.369.096	670.476
3	2006	11.341.848	917.986	1.453.592	710.107
4	2007	12.261.538	960.024	1.543.568	752.977
5	2008	13.551.827	1.013.913	1.650.323	799.564
6	2009	14.798.187	1.077.477	1.782.158	852.208
7	2010	16.252.451	1.153.182	1.890.033	910.627
8	2011	17.820.697	1.240.495	2.007.277	977.444
9	2012	19.582.060	1.339.750	2.153.399	1.049.805
10	2013	21.327.227	1.455.933	2.320.973	1.126.764

Sumber : Sulawesi Selatan dalam Angka, 2004-2013

Tabel 1.1 terlihat bahwa selama periode tahun 2004 sampai 2013, PDRB di kawasan Mamminasata mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Walaupun demikian, pola pertumbuhannya tidak seragam, dimana kota Makassar menjadi *leader* diantara daerah lainnya dalam satu kesatuan kawasan Mamminasata yang ditujukan dengan besarnya nilai PDRB yang dimilikinya sedangkan nilai PDRB terkecil terdapat pada Kabupaten Takalar, PDRB dapat digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan adanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Gambar 1.1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Makassar,
Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar Tahun 2009-2013



Sumber : Sulawesi Selatan dalam Angka, 2009-2013

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2009 sampai 2013, laju pertumbuhan PDRB di kawasan Mamminasata cenderung meningkat namun pada kota Makassar dan Sungguminasa laju pertumbuhan PDRB mengalami keadaan yang fluktuatif dari tahun ke tahun, hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan

ekonomi tidak terjadi secara merata dan bisa jadi disebabkan karena kontribusi seluruh masyarakat atau hanya sebagian masyarakat saja, walau demikian tetaplah kota Makassar unggul dari ketiga kabupaten lainnya.

PDRB per kapita merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah tertentu. Penelitian Noviana (2014) menyatakan PDRB Per kapita adalah total PDRB suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Semakin tinggi tingkat PDRB perkapita di suatu wilayah maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnya, dan sebaliknya semakin rendah tingkat PDRB perkapita di suatu wilayah maka semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Kuncoro (2004) daerah yang memiliki tingkat aglomerasi rendah akan membuat daerah tersebut semakin terbelakang. Disamping itu, penetapan kebijakan desentralisasi fiskal dimana pemerintah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri diharapkan dapat mengurangi ketimpangan wilayah. Desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat.

Penetapan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, kemudian direvisi oleh UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 tentang pemerintah

daerah. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

“Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

Menurut Mardiasmo (2002) optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hendaknya didukung dengan upaya pemda meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro. Berikut adalah data Pendapatan Asli Daerah dan total penerimaan Kota Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar tahun 2009-2013, yaitu :

Tabel 1.2
Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa
dan Kabupaten Takalar Tahun 2009-2013

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Ribuan Rupiah)			
	Makassar	Maros	Gowa	Takalar
2009	169.889.013.768	27.437.789.000	46.999.684.000	13.776.416.000
2010	210.145.729.430	26.454.760.000	54.812.691.000	12.391.994.000
2011	345.350.562.825	47.645.130.000	82.221.491.000	14.835.501.000
2012	484.972.799.508	60.364.409.000	78.700.220.000	32.935.638.000
2013	621.247.679.844	102.470.000.000	109.776.256.000	39.668.045.000

Sumber : Sulawesi Selatan dalam Angka, 2009-2013

Berdasarkan tabel 1.2 di atas data Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar selama 5 tahun terakhir, data Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar jauh di atas dari ketiga Kabupaten lainnya, dan kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 621.247.679.844. kemudian Kabupaten Takalar merupakan Kabupaten yang nilai PAD nya sangat rendah dan mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 32.935.638.000 pada tahun 2012.

Kemudian berikut adalah tabel Total Penerimaan Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar, yaitu:

Tabel 1.3
Total Penerimaan Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan
Kabupaten Takalar Tahun 2009-2013

Tahun	Total Penerimaan (Ribuan Rupiah)			
	Makassar	Maros	Gowa	Takalar
2009	1.208.310.010	479.560.489	647.797.312	414.450.422
2010	1.318.713.000	509.921.334	655.092.987	491.219.098
2011	1.517.481.000	583.491.028	695.947.872	500.509.786
2012	1.977.007.091	708.902.029	821.387.345	602.308.796
2013	1.991.712.003	877.091.331	890.042.099	663.341.982

Sumber: Indikator Ekonomi Sulawesi Selatan, 2009-2013

Berdasarkan tabel 1.3 di atas total penerimaan empat Kabupaten/Kota di Kawasan Mamminasata yaitu Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar pada tahun 2013 paling tinggi di tunjukan di Kota Makassar yaitu sebesar 1.991.712.003 dan total penerimaan yang paling rendah di tujukan di Kabupaten Takalar yaitu hanya 663.341.982, yang artinya Kota Makassar unggul dari ketiga Kabupaten Lainnya.

Fitriani (2005) memperkirakan ada empat faktor yang mendorong daerah melakukan pemekaran, salah satu nya ialah *Fiscal Spoils*, dengan pemekaran wilayah akan memperoleh tambahan sumber daya fiskal dalam bentuk transfer umum, dana bagi hasil (berbagai sumber daya alam), dan untuk daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di perkotaan. Menurut Halim (2001) Kebijakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan pada saat kurang tepat mengingat hampir seluruh daerah sedang berupaya untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi, Akibatnya kebijakan ini kemudian memunculkan kesiapan (fiskal) daerah yang berbeda satu dengan yang lain. Kebijakan ini justru dilakukan pada saat terjadi disparitas pertumbuhan (ekonomi) yang tinggi. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat.

Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah. Daerah dituntut untuk mengotimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-

sektor produktif. Sjafrizal (2008) mengemukakan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka pembangunan daerah, termasuk daerah terbelakang dapat lebih digerakan karena ada wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka aspirasi masyarakat untuk menggali potensi daerah akan lebih tergali. Selain itu, setiap wilayah juga diberikan tambahan alokasi dana yang diberikan dalam bentuk “*block grant*”. Dengan demikian diharapkan proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan pembangunan antar wilayah akan dapat pula di kurangi.

Kondisi demografis sangat berkaitan dengan proses pembangunan dan pertumbuhan suatu negara dan wilayah. Salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah karena perbedaan tingkat pertumbuhan dan perbedaan struktur kependudukan dan perbedaan kondisi ketenagakerjaan termasuk didalamnya adalah tingkat pengangguran. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi. Lesman (2006) melihat kondisi demografis dari sisi pengangguran suatu daerah yaitu jika tingkat pengangguran suatu daerah tinggi akan menyebabkan semakin tinggi nya ketimpangan wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Tingkat Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Mamminasata**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di kemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan di kawasan Mamminasata?
2. Apakah ada pengaruh Aglomerasi, Desentralisasi Fiskal dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di kawasan Mamminasata ?
3. Apakah hipotesis Kuznet berlaku di kawasan Mamminasata ?

C. Hipotesis

Hipotesis yaitu suatu dugaan sementara atau awal yang digunakan dalam penelitian. Hipotesis juga merupakan anggapan atau asumsi dari suatu hipotesis berdasarkan data, teori ekonomi dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan untuk diteliti adalah:

1. Diduga bahwa variabel aglomerasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di kawasan Mamminasata.
2. Diduga bahwa variabel desentralisasi fiskal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di kawasan Mamminasata.

3. Diduga bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di kawasan Mamminasata.

D. Definisi Operasional Variabel

Ruang lingkup penelitian ini mencakup ketimpangan pembangunan di kawasan Mamminasata, maka yang akan di bahas yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah laju kenaikan nilai PDRB riil pada tiap tahun yang terjadi di Kawasan Mamminasata. Satuan yang digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi adalah persen.

2. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit-unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah. Ukuran PDRB dalam penelitian ini adalah metode pendapatan dalam rupiah. PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan kawasan Mamminasata.

3. PDRB Perkapita

Mengikuti Hipotesa Neo-Klasik, PDRB per kapita merupakan variabel yang dapat menunjukkan tingkat pembangunan suatu negara (Sjafrizal, 2008). Adapun cara mengukur PDRB per kapita suatu wilayah yaitu dengan cara PDRB atas dasar harga konstan 2000 dan 2010 kawasan Mamminasata di bagi dengan Jumlah

Penduduk Kawasan Mamminasata. Ukuran dalam PDRB perkapita ini adalah rupiah.

$$\text{PDRB Perkapita} = \frac{\text{PDRBi}}{\text{Jumlah Penduduk } i}$$

PRRB_i = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 dan 2010 di Kawasan Mamminasata (Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar)

Jumlah Penduduk_i = jumlah Penduduk di Kawasan Mamminasata (Kota Makassar Kabupaten Maros kabupaten Gowa dan Takalar).

4. Aglomerasi

Aglomerasi menggambarkan konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Aglomerasi ini diukur menggunakan proksi yang dipakai dalam penelitian Jaime Bonet (2006) yang mendasarkan ukuran aglomerasi pada aglomerasi yang dihitung dari Share PDRB wilayah terhadap total PDRB dalam penelitian ini menggunakan persen.

$$Ag = \frac{\text{PDRBi}}{\text{PDRB}_{\text{tot}}}$$

Ag = Aglomerasi

PRRB_i = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 dan 2010 Kabupaten/Kota di Kawasan Mamminasata

PDRB_{tot} = PDRB atas dasar harga Konstan 2000 dan 2010 Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Desentralisasi fiskal

Desentralisasi fiskal dapat didefinisikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan. Variabel ini menjelaskan besaran relatif antara pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah dinyatakan dalam bentuk persen.

6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran yaitu seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara efektif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu. Pengangguran dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya yaitu pengangguran friksional, pengangguran struktural dan kongjungtur. Untuk memperoleh tingkat pengangguran terbuka yaitu orang yang mencari kerja di bagi angkatan kerja kemudian dikali 100 persen. Yang dinyatakan dalam persen.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian Yuki Angelina menyimpulkan bahwa Tingkat Ketimpangan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta diukur dengan menggunakan Pendekatan PDRB perkapita relatif selama periode penelitian tahun 1995-2008 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 1998-2000 ketimpangan wilayah pada Provinsi ini mengalami penurunan akibat krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi untuk tahun selanjutnya ketimpangan kembali melebar.

Hipotesis Kuznet mengenai Kurva U-Terbalik terbukti untuk Provinsi DKI Jakarta. Pada pertumbuhan awal ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta memburuk, kemudian pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan menurun. Akan tetapi, suatu waktu ketimpangan tersebut akan kembali meningkat sehingga terbukti bahwa terjadi trade off antara pertumbuhan ekonomi dengan ketidakmerataan. Dari hasil regresi PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,0008 pada $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti kenaikan PDRB per kapita sebesar 1 persen akan meningkatkan ketimpangan wilayah di Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,665312 persen. Variabel independen kedua yaitu investasi berpengaruh negatif dan signifikan. Hal ini berarti kenaikan investasi swasta sebesar 1 persen akan mengurangi ketimpangan wilayah di DKI Jakarta sebesar 0,038387 persen. Aglomerasi berhubungan positif dan signifikan sebesar 0,0424 pada $\alpha = 5\%$, dimana kenaikan tingkat aglomerasi 1 persen akan meningkatkan ketimpangan wilayah di DKI Jakarta sebesar 0,080914 persen.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan Widi Asih, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian yaitu: Perkembangan kemajuan perekonomian tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2004 hingga 2013. Variabel komponen pertumbuhan regional share dikeluarkan dari model estimasi data panel, sebab memiliki korelasi yang tinggi terhadap variabel lainnya. Variabel komponen pertumbuhan proporsional shift, tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan di Kabupaten Cilacap. Variabel komponen pertumbuhan competitive shift berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan. Variabel jumlah penduduk menurut

tingkat pendidikan SMA dan perguruan tinggi berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan di Kabupaten Cilacap. Variabel jumlah keluarga miskin berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan di Kabupaten Cilacap. Hal tersebut dikarenakan, hampir sebagian jumlah keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan di Kabupaten Cilacap merupakan keluarga miskin. Apabila jumlah keluarga miskin semakin bertambah berarti menunjukkan penurunan terhadap gap diantara keluarga sejahtera dan keluarga miskin, sehingga ketimpangan pun akan menurun. Variabel pertumbuhan penduduk migrasi tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan di Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan dari Ida Ayu Indah Utami Dewi, dapat disimpulkan bahwa Struktur pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali terbagi dalam empat pola yaitu : perekonomian Daerah yang maju dan tumbuh cepat, terdiri dari Kabupaten Badung; daerah berkembang cepat tetapi tidak maju, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Buleleng; daerah maju tapi tertekan yaitu Kabupaten Klungkung; dan daerah tertinggal yaitu Kabupaten Tabanan, Jembrana, Bangli dan Karangasem. Indeks Williamson di Provinsi Bali berkisar pada nilai 0,8428 yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Bali tinggi. Hipotesis Kuznets tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan berbentuk kurva U terbalik tidak berlaku di Provinsi Bali. Pada penelitian Muhammad Noor Sandi Hidayat menyimpulkan bahwa Variabel penerimaan daerah

yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, akan menciptakan pertumbuhan ekonomi hal tersebut dikarenakan variabel penerimaan daerah akan menopang pengeluaran daerah. Hal tersebut bisa berjalan dengan baik jika pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah tidak bersifat konsumtif melainkan lebih pada pengeluaran yang bersifat investasi sehingga penerimaan daerah bisa dimaksimalkan dan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. jika siklus ekonomi di daerah tersebut baik, maka dapat menarik investor dari luar untuk masuk dan berinvestasi di daerah tersebut.

Desentralisasi Pengeluaran menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi secara signifikan karena esensi otonomi pengelolaan fiskal di daerah merupakan kebebasan pemerintah daerah untuk membelanjakan dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Hal ini membuat perekonomian daerah akan sangat tergantung pada alokasi dan komposisi belanja daerah. TPAK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dapat disebabkan salah satunya dari pemerintah daerah itu sendiri, dimana pemerintah daerah belum mampu memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan yang diharapkan, hal tersebut menjadikan meningkatnya TPAK, tanpa diimbangi bertambahnya lapangan pekerjaan akan meningkatkan pengangguran yang secara langsung menurunkan pendapatan perkapita dan berdampak pada menurunnya PDRB. Semakin tinggi nilai investasi yang dikelola suatu wilayah maka perekonomian wilayah tersebut akan meningkat. hal ini dikarenakan investasi dapat merangsang produksi tiap sektor pada daerah tersebut.

Tabel 1.4
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Analisis	Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sutarno dan Mudrajad Kuncoro (2001)	Pertumbuhan Ekonomi dan ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas Tahun 1993-2000	Indeks Williams on dan Indeks Entropy Theil.	Pada periode pengamatan 1993– 2000 terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan, baik dianalisis dengan indeks Williamson maupun dengan indeks Entropy Theil. Ketimpangan ini salah satunya diakibatkan konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial.
2.	Vibiz Economic Research Center	Efektifitas Faktor Input dan Ketimpangan Pendapatan Daerah setelah Desentralisasi Fiskal		Berdasarkan penelitian menggunakan model pertumbuhan regional ternyata factor endowment variabel investasi yaitu capital, labor, human capital signifikan mempengaruhi PDRB provinsi di Indonesia.
3.	Yuki Angelia (2010)	Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 1995-2008	Regresi linear berganda dan kurva U terbalik	Hipotesis Kuznet mengenai Kurva U-Terbalik terbukti untuk Provinsi DKI Jakarta. Dari hasil regresi PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,0008 pada $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti kenaikan PDRB per kapita sebesar 1 persen akan meningkatkan ketimpangan wilayah di Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,665312 persen. Variabel independen kedua yaitu investasi berpengaruh negatif dan signifikan Hal ini berarti kenaikan investasi swasta sebesar 1 persen akan mengurangi ketimpangan wilayah di DKI Jakarta sebesar 0,038387 persen. Aglomerasi berhubungan positif dan signifikan sebesar 0,0424 pada $\alpha = 5\%$.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Widi Asih (2015)	Analisis Ketimpangan Dalam Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan Di Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2013	Analisis regresi data panel dan dan tipologi klasen	Variabel komponen pertumbuhan regional share dikeluarkan dari model estimasi data panel, sebab memiliki korelasi yang tinggi terhadap variabel lainnya. Variabel komponen pertumbuhan proporsional shift, tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan di Kabupaten Cilacap. Variabel komponen pertumbuhan competitive shift berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan. Variabel jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan SMA dan perguruan tinggi berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan di Kabupaten Cilacap Variabel jumlah keluarga miskin berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi kecamatan di Kabupaten Cilacap.
5.	Lailatul Fitriya, Dkk (2013)	Analisis Ketimpangan Pembangunan Daerah Serta hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Gerbangkertosusila Provinsi Jawa Timur	Metode analisis data pada penelitian ini yaitu Indeks Williams on	Berdasarkan hasil analisis tersebut, tingkat ketimpangan di GERBANGKERTOSUSIA Provinsi Jawa Timur mengalami kecenderungan peningkatan di tahun 2007 hingga 2011 terlihat dari hasil analisis dari 0.917453818 menjadi 0.950299072. Terjadi peningkatan sebesar 0.013 pada tahun 2008. Pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang relatif kecil yaitu sebesar 0.004 , dan terus mengalami peningkatan sebesar 0,01 pada tahun 2010 menjadi 0.945246655 dan pada tahun 2011 meningkat sebesar 0,005 menjadi 0.950299072.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Ida Ayu Indah Utami Dewi, Dkk	Analisis Ketimpangan Pembangunan Antara Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali	Tipologi Klasen, Indeks Williams on dan regresi nonlinear	Perekonomian Daerah yang maju dan tumbuh cepat, terdiri dari Kabupaten Badung; daerah berkembang cepat tetapi tidak maju, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Buleleng; daerah maju tapi tertekan yaitu Kabupaten Klungkung; dan daerah tertinggal yaitu Kabupaten Tabanan, Jembrana, Bangli dan Karangasem. Indeks Williamson di Provinsi Bali berkisar pada nilai 0,8428 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Bali tinggi. Hipotesis Kuznets tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan berbentuk kurva U terbalik tidak berlaku di Provinsi Bali.
7.	Reza Fauzi Bakri, Dkk (2016)	Disparitas Pembangunan Antar Wilayah Makassar, Maros, Gowa dan Takalar	Tipologi Klasen dan Indeks Williams on	Perkembangan wilayah yang paling maju adalah di wilayah Kota Makassar, dan wilayah relatif tertinggal adalah di wilayah Kabupaten Takalar. Tingkat disparitas dari wilayah Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar tergolong tinggi dengan nilai indeks 0,75 pada tahun 2015.
8.	Muhammad Noor Sandi Hidayat (2016)	Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Jawa Timur (Studi Kasus 38 Kab/Kota Di Jawa Timur)	Analisis regresi linear berganda	Pada penelitian ini Variabel penerimaan daerah ber pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dikarenakan penerimaan daerah akan menopang pengeluaran daerah. Kemudian Desentralisasi Pengeluaran menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi secara signifikan karena esensi otonomi pengelolaan fiskal di daerah merupakan kebebasan pemerintah daerah untuk membelanjakan dana sesuai dengan kebutuhan daerah

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan tingkat ketimpangan pembangunan di kawasan Mamminasata
2. Untuk mengetahui pengaruh Aglomerasi, Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di kawasan Mamminasata
3. Untuk membuktikan apakah hipotesis Kuznets berlaku di Kawasan Mamminasata

Adapun Kegunaan dari penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan sebagai:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai ketimpangan pembangunan khususnya yang berada di kawasan Mamminasata.
2. Secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah ketimpangan pembangunan yang terus menerus terjadi di Indonesia khususnya kawasan Mamminasata. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengambil solusi yang tepat dan baik guna memecahkan masalah ketimpangan pembangunan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pembangunan Ekonomi

Menurut Kuncoro (2006) “Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pendapatan perkapita suatu negara meningkat selama kurun waktu panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan absolut”. Laju pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Bruto* atau GDP). Namun demikian, cara tersebut memiliki kelemahan karena cara itu tidak secara tepat menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang dicapai.

Saat terjadi pertambahan kegiatan ekonomi masyarakat, terjadi pula pertambahan penduduk. Oleh karena itu pertambahan kegiatan ekonomi ini digunakan untuk mempertinggi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Apabila pertambahan GDP/GNP lebih rendah dibandingkan pertambahan penduduk maka pendapatan per kapita akan tetap sama atau cenderung menurun. Ini berarti bahwa pertambahan GDP/GNP tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan ekonomi.

Pembangunan ekonomi diperlukan faktor pendukung agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan pembangunan. Berdasarkan Jhingan (2012), salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi ialah pembentukan atau pengumpulan modal. Pembentukan modal meliputi modal material maupun modal

manusia. Ada berbagai pendapat, bahwa dalam pembangunan ekonomi yang dibutuhkan hanya modal material saja, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa modal manusia juga dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembentukan modal diharapkan tujuan pokok pembangunan akan tercapai. Dan tujuan pokok pembangunan ekonomi itu sendiri adalah untuk membangun peralatan modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan dan industri. Selain itu modal juga diperlukan untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, jalan raya, jalan kereta api dan sebagainya.

Peningkatan kemajuan perekonomian, suatu negara harus memenuhi persyaratan dasar dalam melakukan pembangunan. Menurut Jhingan (2012), prasyarat-prasyarat dasar bagi pembangunan ekonomi diantaranya:

- a. Atas dasar kekuatan sendiri, hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan materiil harus muncul dari warga negara itu sendiri.
- b. Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar yang menyebabkan immobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral dan pembangunan.
- c. Perubahan struktural, adanya peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri moderen.
- d. Pembentukan modal, merupakan faktor penting dan strategis didalam proses pembangunan.
- e. Kriteria investasi yang tepat, merupakan tanggungjawab negara untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan masyarakat.
- f. Persyaratan sosio budaya, wawasan sosio budaya masyarakat haruslah diubah jikalau pembangunan diharapkan dapat berjalan.
- g. Administrasi, kehadiran administrasi yang kuat, berwibawa, dan tidak korupsi, merupakan sine qua non pembangunan ekonomi.

2. Pembangunan Ekonomi Daerah

Perubahan sistem pemerintahan Indonesia melalui kebijakan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal, yang telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999 dan telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Telah membawa perubahan dalam sistem pembangunan, dimana pemerintah daerah diberi wewenang yang lebih dalam mengatur daerahnya masing-masing. Berdasarkan Sjafrizal (2014), perubahan yang terjadi pada dasarnya menyangkut dua hal pokok yaitu pertama, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam melakukan pengelolaan pembangunan (Desentralisasi Pembangunan). Kedua, pemerintah diberikan sumber keuangan baru dan kewenangan pengelolaan keuangan yang lebih besar (Desentralisasi Fiskal).

Menurut Arsyad (1999) Pemberian wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah dimaksudkan agar proses pembangunan disesuaikan dengan permasalahan pokok yang dialami. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik secara lokal. Sedangkan keberhasilan pembangunan daerah, selain sebagai bentuk andil dalam pembangunan nasional, tetapi juga ditujukan dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah, menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Menurut Sjafrizal (2012) “Upaya pembangunan yang dilakukan daerah dapat berupa kemakmuran wilayah dan kemakmuran masyarakat”. Pembangunan

dalam mewujudkan kemakmuran wilayah (*place prosperity*), ditujukan agar kondisi fisik daerah lebih baik. Seperti halnya, sarana dan prasarana, perumahan dan lingkungan pemukiman, kegiatan ekonomi masyarakat, fasilitas pelayanan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan, kualitas lingkungan hidup, dll. Meningkatkan kemakmuran wilayah dapat mendorong pesat peningkatan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan, hal tersebut disebabkan karena kondisi daerah yang sudah baik dapat menjadi daya tarik bagi para investor dalam menanamkan modalnya.

Pembangunan yang ditujukan untuk kemakmuran masyarakat (*people prosperity*), pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seperti halnya, pengembangan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kegiatan produksi masyarakat dalam bentuk pengembangan. Pembangunan kemakmuran masyarakat, biasanya membutuhkan waktu yang lama, sehingga pertumbuhan ekonomi maupun penyediaan lapangan kerja umumnya mengalami pertumbuhan yang lambat.

Arsyad (1997) mengartikan pembangunan ekonomi daerah sebagai suatu proses dimana:

Pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi dengan wilayah tersebut. Lanjut Arsyad pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Lanjut Arsyad, Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber-sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggung jawab. Dalam pembangunan ekonomi daerah diperlukan campur tangan pemerintah. Apabila pembangunan daerah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar maka pembangunan dan hasilnya tidak dapat dirasakan oleh seluruh daerah secara merata. Keadaan sosial ekonomi yang berbeda di setiap daerah akan membawa implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintah untuk tiap daerah berbeda pula. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan daerah. Memusatnya ekspansi ekonomi di suatu daerah disebabkan berbagai hal, misalnya kondisi dan situasi alamiah yang ada, letak geografis, dan sebagainya.

Myrdal (Jhingan, 1993) mengenai dampak balik pada suatu daerah “Ekspansi ekonomi suatu daerah akan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain”. Oleh karena itu, apabila proses perekonomian diserahkan kepada mekanisme pasar akan membawa akibat-akibat yang kurang menguntungkan baik bagi daerah-daerah yang terbelakang maupun daerah-daerah maju dan pada akhirnya justru dapat mengganggu kestabilan ekonomi negara secara keseluruhan.

3. Ketimpangan Pembangunan

Secara teoritis, permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah mula-mula dimunculkan oleh Douglas C North dalam analisisnya tentang Teori

Pertumbuhan Neo-Klasik. Menurut Sjafrizal (2008) Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah “prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah”. Hipotesa ini kemudian lazim dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik. Menurut Hipotesa Neo-klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun.

Arsyad (1997) juga berpendapat “perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar wilayah menyebabkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar wilayah”. Ekspansi ekonomi suatu daerah akan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena tenaga kerja yang ada, modal, perdagangan akan pindah ke daerah yang melakukan ekspansi tersebut.

Menurut Todaro (2004) “Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah”. Adanya ketimpangan, akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu daerah-daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Akan tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi,

melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil.

Menurut Sjafrizal (2012) beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah yaitu:

1. Perbedaan kandungan Sumber Daya Alam (SDA)
2. Perbedaan kondisi demografis
3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa
4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah
5. Alokasi dana pembangunan antar wilayah

Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif lebih murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam yang rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam yang lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah.

Perbedaan kondisi demografis meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendudukan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat setempat. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang

lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Myrdal (Jhingan, 1993) mendefinisikan dampak balik (backwash effect) sebagai semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi suatu ekonomi di suatu tempat karena sebab-sebab di luar tempat itu. Dalam istilah ini Myrdal memasukkan dampak migrasi, perpindahan modal, dan perdagangan serta keseluruhan dampak yang timbul dari proses sebab-musabab sirkuler antara faktor-faktor baik non ekonomi maupun ekonomi. Ketimpangan regional berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan berpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah lain tetap terlantar. Penyebab gejala ini, menurut Prof. Myrdal ialah peranan bebas kekuatan pasar, yang cenderung memperlebar dibandingkan mempersempit ketimpangan regional (Jhingan, 1993).

Alokasi dana ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Pada sistem pemerintahan otonomi maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih rendah. Untuk investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dimana keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta. Keuntungan lokasi ditentukan oleh biaya transpor baik bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha,

perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Oleh karena itu investasi akan cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan daerah pedesaan.

Menurut Arsyad (2010) mengemukakan ada 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan pada negara-negara sedang berkembang, yaitu:

1. Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita.
2. Inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*)
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*)
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Adapun faktor-faktor yang menentukan ketimpangan pembangunan antar wilayah antara lain konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah, mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah serta alokasi investasi antar wilayah dengan wilayah lainnya. Bahkan kebijakan yang dilakukan oleh suatu daerah dapat pula mempengaruhi ketimpangan pembangunan regional. Oleh karena itu, untuk menghitung tingkat ketimpangan wilayah digunakan beberapa metode yaitu indeks Williamson, indeks *Entropy Theil* dan Ketimpangan Berdasarkan Konsep PDRB per Kapita Relatif. Namun yang akan digunakan dalam penelitian ini hanyalah indeks *Entropy Theil*.

Ying (Kuncoro, 2006) menjelaskan “untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto, juga menggunakan indeks ketimpangan regional Theil”. Indeks ketimpangan regional Theil tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antarwilayah atau regional. Dengan rumus sebagai berikut :

$$I(y) = \sum (y_j \div Y) \times \log[(y_j \div Y) \div (x_j \div X)]$$

Keterangan :

$I(y)$ = Indeks Entropy Theil

y_j = PDRB perkapita Makassar, Maros, Gowa dan Takalar

Y = PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Selatan

x_j = Jumlah penduduk Makassar, Maros, Gowa dan Takalar

X = Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan

Indeks Entropy Theil memungkinkan untuk membuat perbandingan selama kurun waktu tertentu. Indeks ini juga dapat menyediakan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil, yang pertama akan digunakan untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu dan yang kedua juga penting ketika kita mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan atau ketimpangan spasial.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Kuznets dalam Jhingan (2004) mendefinisikan “pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan

jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya”. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini memiliki tiga komponen yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. Kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. Ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara tepat.

Pertumbuhan ekonomi dari sudut tinjauan ekonomi dapat direfleksikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Variabel ini sering digunakan untuk mengukur seberapa baik ekonomi suatu Negara sudah dikelola dengan benar. Menurut Mankiw (2003), “PDB dapat dipandang dalam dua hal”. Pertama, total pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam perekonomian. Kedua, adalah total pengeluaran atas produk barang dan jasa dalam ekonomi. Berdasarkan pendekatan sejarah pertumbuhan Negara-negara di dunia, Rostow mencetuskan suatu model tahapan pertumbuhan ekonomi (*the stage of economic growth*). Menurutnya bahwa proses pertumbuhan dapat dibedakan ke dalam lima tahap dan setiap Negara atau wilayah dapat digolongkan ke dalam salah satu dari kelima tahapan tersebut.

Berkaitan dengan level awal pertumbuhan ekonomi (*The Initial Level of GDP*), Barry dan Jules (2008) menjelaskan bahwa variabel ini penting dalam analisa “pertumbuhan ekonomi karena digunakan untuk melihat tingkat konvergensi

pertumbuhan ekonomi antar wilayah”. Konvergensi ini mengindikasikan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan initial per capita regional GDP. Artinya semakin tinggi level awal pertumbuhan ekonomi (*initial per capita regional GDP*) maka akan semakin rendahnya pertumbuhan ekonomi dalam tahun berikutnya. Diungkapkan pula bahwa populasi dapat menurunkan produktivitas karena adanya efek *diminishing returns* atas penggunaan tanah dan sumber daya lainnya. Menurut Wibowo (2008) “hubungan antara pertumbuhan jumlah penduduk dan pendapatan per kapita tergantung dari pemanfaatan ilmu pengetahuan guna mengeliminasi efek *diminishing returns* atas penggunaan sumber daya alam”. Selanjutnya sebagaimana disepakati oleh para praktisi dan akademisi bahwa *human capital* atau kualitas sumber daya manusia terkait secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

5. Aglomerasi

Menurut Sihombing (2008) Pertumbuhan ekonomi antar daerah biasanya tidak akan sama. Terdapat daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi akan tetapi disisi lain ada pula daerah yang tingkat pertumbuhan ekonominya rendah. Perbedaan daerah dilihat dari pendapatan maupun pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada munculnya aglomerasi, yaitu terpusatnya kegiatan-kegiatan ekonomi pada suatu daerah saja dan tidak terjadi persebaran yang merata.

Menurut Kuncoro (2002) mendefinisikan “aglomerasi sebagai konsentrasi spasial dari aktifitas ekonomi di kawasan perkotaan”. Dikatakan seperti itu karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*) yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen

untuk meminimisasi biaya-biaya seperti biaya transportasi, informasi, dan komunikasi.

Menurut Tarigan (2007), keuntungan berlokasi pada tempat konsentrasi atau “terjadinya aglomerasi disebabkan faktor skala ekonomi (*economic of scale*) dan *economic of agglomeration*”. *Economic of scale* adalah keuntungan karena dapat berproduksi berdasarkan spesialisasi sehingga produksi lebih besar dan biaya per unit lebih efisien. Sedangkan *economic of agglomeration* ialah keuntungan karena di tempat itu terdapat berbagai keperluan dan fasilitas yang dapat digunakan oleh perusahaan.

Sjafrizal (2008) “Konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah yang cukup tinggi akan cenderung mendorong meningkatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah”, sebab proses pembangunan daerah akan lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi. Sedangkan konsentrasi kegiatan ekonomi rendah proses pembangunan akan berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, ketidakmerataan ini menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

6. Desentralisasi Fiskal

Terminologi desentralisasi ternyata tidak hanya memiliki satu makna. Ia dapat diterjemahkan ke dalam sejumlah arti, tergantung pada konteks penggunaannya. Parson dalam Hidayat (2005) mendefinisikan “desentralisasi sebagai berbagi kekuasaan pemerintah antara kelompok pemegang kekuasaan di pusat dengan kelompok-kelompok lainnya”, di mana masing-masing kelompok tersebut memiliki

otoritas untuk mengatur bidang-bidang tertentu dalam lingkup territorial suatu Negara.

Mawhood (1987) dengan tegas mengatakan bahwa “desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah”. Sementara itu, Smith (Hidayat, 2005) juga merumuskan definisi “desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dari tingkatan lebih atas ke tingkatan lebih rendah”, dalam suatu hierarki territorial, yang dapat saja berlaku pada organisasi pemerintah dalam suatu Negara, maupun pada organisasi-organisasi besar lainnya (organisasi non pemerintah).

Kuncoro (2009) Sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 33 tahun 2004, pengertian “desentralisasi dinyatakan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Ini artinya desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab (akan fungsi-fungsi publik) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut Tanzi (2002) “Desentralisasi sesungguhnya merupakan alat atau instrument yang dapat digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan partisipatif”.

Khusaini (2006) Secara konseptual, desentralisasi fiskal dapat didefinisikan sebagai “suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan”. Dalam pelaksanaannya, konsep desentralisasi fiskal yang dikenal selama ini sebagai *money follow function* mensyaratkan bahwa

pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah (*expenditure assignment*) akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (*revenue assignment*). Menurut Rahmawati (2008) “penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah akan membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut”. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada. Prosesnya dapat dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, yaitu pembagian penerimaan antar tingkatan pemerintahan guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi.

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

PAD/TPD (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
➤ 50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Fisipol UGM

Berdasarkan prinsip *money follow function* Mahi (2002) menjelaskan bahwa kajian dalam pelaksanaan “desentralisasi fiskal pada dasarnya dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan *expenditure assignment* dan *revenue assignment*”. Pendekatan *expenditure assignment* menyatakan bahwa terjadi perubahan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga peran lokal *public goods* meningkat. Sedangkan dalam pendekatan *revenue assignment* dijelaskan peningkatan kemampuan keuangan melalui alih sumber pembiayaan pusat kepada daerah, dalam rangka membiayai fungsi yang didesentralisasikan.

Tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dapat dipelajari dengan melihat besarnya derajat desentralisasi fiskal suatu daerah. Pengukuran derajat desentralisasi fiskal dapat dilakukan melalui analisis ratio. Menurut Smith dan Uppal (Hessel, 2007) derajat desentralisasi fiskal dapat diukur dengan menghitung:

- a. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan daerah
- b. Rasio sumbangan dan bantuan terhadap Total Penerimaan Daerah
- c. Rasio Total Penerimaan daerah terhadap Total Penerimaan Negara

7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Secara internasional, pengangguran yaitu seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara efektif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh yang diinginkannya. Menurut BPS, pengangguran yaitu bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun mereka yang sudah pernah bekerja) atau sedang mempersiapkan suatu usaha,

mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum memulai bekerja. Tingkat pengangguran di hitung dengan rumus dibawah ini yaitu :

$$\text{Tingkat pengangguran tahun } i = \sum \frac{\text{orang yang mencari pekerjaan}}{\sum \text{angkatan kerja}} \times 100\%$$

Menurut Sadono (2002), pengangguran dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, sebagai berikut :

- a. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.
- b. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian
- c. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat.

8. Hipotesis Kuznets

Kuznets (1995) dalam Kuncoro (2006) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*) bahwa “mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata”. Menurut Kuznets, “pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya”. Todaro (2004) “Kenaikan kapasitas ditentukan oleh adanya kemajuan teknologi, institusional dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada”.

Profesor Kuznet (Todaro, 2004) mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua negara yang sekarang maju sebagai berikut :

- a. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
- b. Tingkat kenaikan produktivitas faktor total yang tinggi.
- c. Tingkat transformasi struktural yang ekonomi yang tinggi.
- d. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.
- e. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.
- f. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia.

9. Pengaruh Antar Variabel

a. Pengaruh antara Aglomerasi dan Ketimpangan Pembangunan

Sjafrizal (2008) mengatakan “terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah”. Konsentrasi ekonomi ini tercermin dalam kegiatan aglomerasi. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cendeung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula sebaliknya, bilamana konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadi pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat.

Menurut Sjafrizal (2008) “Aglomerasi dapat disebabkan oleh 3 hal:

1. Terdapatnya sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu, misalnya minyak bumi, gas, batubara dan bahan mineral lainnya.
2. Meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut maupun udara juga ikut mempengaruhi konsentrasi ekonomi.
3. Kondisi demografis (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumberdaya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jaime Bonet (2006), dimana Bonet menganalisis pengaruh variabel aglomerasi produksi terhadap ketimpangan pendapatan regional. Hasil penelitian Bonet menunjukkan bahwa antara “aglomerasi dan ketimpangan pendapatan regional terdapat hubungan positif dan signifikan”. Hal itu berarti setiap kenaikan tingkat aglomerasi maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan regional.

b. Pengaruh antara Desentralisasi Fiskal dengan Ketimpangan

Pembangunan Wilayah semenjak ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, kemudian direvisi oleh UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dimana pemerintah daerah diberikan wewenang untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pemerintah daerah memiliki dominasi terhadap usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahnya.

Sjafrizal (2008) menguraikan bahwa “pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan dapat digunakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah”. Hal ini jelas karena, dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka aktivitas pembangunan daerah, termasuk daerah terbelakang akan dapat lebih digerakkan karena ada wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka berbagai inisiatif dan aspirasi masyarakat untuk menggali potensi daerah akan dapat lebih digerakkan. Bila hal ini dapat dilakukan, maka proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan pembangunan antar wilayah akan dapat pula dikurangi.

Penelitian yang dilakukan oleh Lessmann (2006) yang menganalisis mengenai “Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Regional: Menggunakan Pendekatan Data Panel Pada Negara-Negara OECD”. Dalam penelitiannya Lessmann menemukan bahwa derajat dari desentralisasi yang tinggi menyebabkan rendahnya ketimpangan regional. Jadi, wilayah-wilayah terbelakang atau miskin tidak akan dirugikan dari adanya desentralisasi, begitupun sebaliknya.

c. Pengaruh antara Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Ketimpangan

Menurut Syafrizal (2008) “Kondisi demografis suatu wilayah meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur dari kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan yang dimiliki masyarakat daerah”. Kondisi

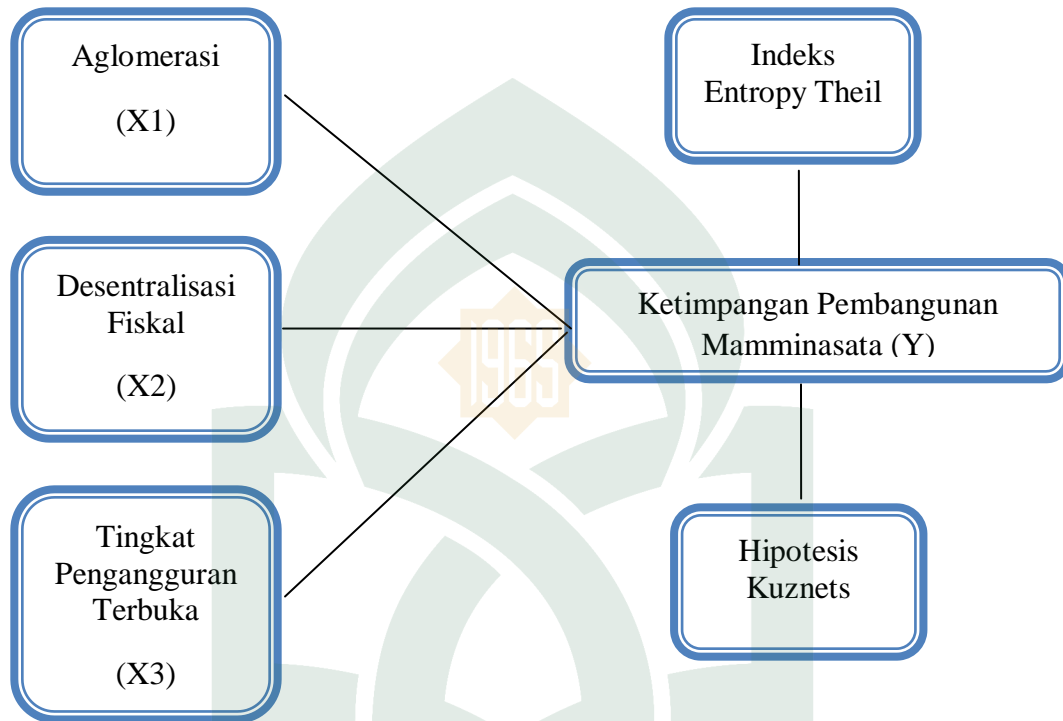
demografis berpengaruh terhadap produktivitas kerja dalam suatu daerah. Kondisi demografis yang baik cenderung akan meningkatkan produktivitas kerja, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tingkat pengangguran yang tinggi nantinya akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas suatu wilayah, sehingga akan menyebabkan produktivitas suatu wilayah tidak optimal dan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut tertinggal dengan wilayah lainnya. Melihat kondisi demografis dari sisi tingkat pengangguran di suatu daerah, tingkat pengangguran yang tinggi akan menyebabkan ketimpangan yang tinggi pula.

Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat daerah. Tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih rendah, demikian pula sebaliknya, indikator ini sangat penting bagi Indonesia sebagai negara dengan penduduk besar sehingga penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak merupakan sasaran utama pembangunan daerah yang bersifat strategis.

Penelitian Ulfie (2014) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran memiliki hubungan positif terhadap tingkat ketimpangan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila tingkat pengangguran rendah, maka pendapatan perkapita akan meningkat. Hal ini pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan di suatu daerah pula.

B. Kerangka Pikir

Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitian



Pembangunan daerah ingin mewujudkan tujuan pembangunan berupa Pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan, daerah yang bersangkutan tersebut yaitu daerah kawasan Mamminasata, pemerintah daerah dari masing-masing 4 kabupaten/kota yang ada di kawasan Mamminasata harus mempunyai kebijakan pembangunan daerah nya guna mewujudkan harapan pembangunan berupa pemerataan atau tidak terjadi kesenjangan pembangunan. Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat ketimpangan yaitu menggunakan indeks Entropy Theil dan untuk mengetahui

pengaruh terhadap ketimpangan di kawasan Mamminasata faktor-faktor yang di gunakan yaitu, Aglomerasi, Desentralisasi Fiskal dan Tingat Pengangguran Terbuka.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini terkait dengan ketimpangan dalam pembangunan ekonomi kawasan Mamminasata Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan dan waktu penelitian bulan Juni 2017 sampai selesai.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Kuncoro (2004) data skunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Lembaga pengumpul data dalam penelitian ini antara lain:

1. Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan dalam beberapa terbitan.
2. Literatur-literatur serta informasi-informasi tertulis baik yang berasal dari instansi terkait maupun internet, yang berhubungan dengan topik penelitian untuk memperoleh data sekunder.

Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data PDRB atas dasar harga konstan 2000 Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar tahun 2004 sampai 2013.
2. Data PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar tahun 2014 sampai 2015.
3. Data PDRB atas dasar harga konstan 2000 di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2004 sampai 2013
4. Data PDRB atas dasar harga konstan 2010 di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 sampai 2015
5. Data jumlah penduduk Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar tahun 2004 sampai 2015.
6. Data Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar tahun 2004 sampai 2015.
7. Data Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar tahun 2004 sampai 2015.
8. Data total penerimaan Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar tahun 2004 sampai 2015.
9. Data Geografis dan data-data yang mendukung penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi dan lain-lain yang masih relevan dalam penelitian ini. Data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dari Badan Pusat Statistik di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang diperoleh adalah data dalam bentuk tahunan untuk masing-masing variabel.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik Deskriptif dan analisis regresi data panel. Statistik deskriptif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama yakni perhitungan tingkat ketimpangan wilayah pembuktian melalui indeks Entropy Theil dan untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua analisis regresi data panel yaitu pengaruh variabel Aglomerasi, Desentralisasi Fiskal dan Tingkat pengangguran Terbuka Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar terhadap ketimpangan pembangunan di kawasan Mamminasata, kemudian untuk menjawab pertanyaan penelitian ketiga Hipotesis Kuznets dijelaskan melalui gambar kurva:

1. Menjawab pertanyaan pertama yaitu menggunakan indeks Entropy theil :

Ying (Kuncoro, 2006) menjelaskan untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto, juga menggunakan indeks ketimpangan regional. Dengan rumus sebagai berikut :

$$I(y) = \sum (y_j \div Y) \times \log[(y_j \div Y) \div (x_j \div X)]$$

Keterangan :

$I(y)$ = indeks Entropy Theil

y_j = PDRB perkapita Makassar, Maros, Gowa dan Takalar

- Y = PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Selatan
- x_j = jumlah penduduk Makassar, Maros, Gowa dan Takalar
- X = jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan

Penjelasan dari indeks Entropy theil yaitu bila indeks mendekati 1 artinya sangat timpang dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 berarti sangat merata. Kelebihan dari indeks entropi theil yang pertama adalah indeks ini menghitung ketimpangan dalam daerah dan antardaerah secara sekaligus, sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas, yang kedua adalah indeks ini dapat pula dihitung kontribusi (dalam presentase) masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan implikasi kebijakan yang cukup penting.

2. Menjawab pertanyaan kedua yaitu menggunakan regresi data panel :

Analisis regresi, dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dilakukan untuk melihat pengaruh dari faktor Aglomerasi dan Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap ketimpangan wilayah. Penggunaan metode analisis regresi linear berganda memerlukan asumsi klasik yang secara statistik harus dipenuhi. Asumsi klasik tersebut meliputi asumsi normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas.

Teknik Pengolahan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menguji asumsi-asumsi yang ada dalam pemodelan regresi linear berganda.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. Sering terjadi kesalahan yang jamak yaitu bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel.

2) Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi yang kuat diantara variabel-variabel bebas (X) yang di ikut sertakan dalam pembentukan model regresi linear. Untuk mendeteksi multikolinearitas dengan menggunakan SPSS dapat dilakukan dengan melihat korelasi antar variabel bebas (*Correlation Matrix*).

3) Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi diantara anggota-anggota dari serangkaian observasi yang berderetan waktu. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi antara residual satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Pengujian ini menggunakan *Durbin Watson*.

4) Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi

heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis grafik, yaitu melihat grafik *scartter plot* antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID.

Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengidentifikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

b. Koefisien Korelasi (R)

Koefisien korelasi pada dasarnya merupakan nilai yang menunjukkan tentang adanya hubungan antara dua variabel atau lebih serta besarnya hubungan tersebut.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variabel independent mampu menjelaskan variabel dependen.

d. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam

bentuk kalimat pertanyaan. Dalam penelitian ini menggunakan hipotesis komparatif untuk pengaruh atau sumbangan variabel aglomerasi, desentralisasi fiskal dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat ketimpangan pembangunan pada kawasan mamminasata.

1) Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara signifikan terhadap variabel dependen dengan melihat pengaruh terhadap variabel dependen, dengan kata lain perubahan yang terjadi pada variabel terikat tidak dapat dijelaskan oleh perubahan variabel independen, di mana tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5%.

2) Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen secara nyata. Uji t digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, di mana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%.

3. Menjawab pertanyaan ketiga hipotesis Kuznets menggunakan kurva U terbalik.

Kurva U terbalik oleh Kuznets dalam Todaro (2006), yaitu dimana pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi ketimpangan akan memburuk atau

membesar dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan menurun, namun pada suatu waktu ketimpangan akan naik dan demikian seterusnya sehingga terjadi peristiwa yang berulang kali dan jika digambarkan akan membentuk kurva U terbalik.

Menurut Kuncoro (2004), mengatakan hipotesis Kuznets dapat dibuktikan dengan membuat grafik antara indeks ketimpangan dan pertumbuhan PDRB. Grafik tersebut merupakan hubungan antara indeks ketimpangan Entropy theil dengan pertumbuhan PDRB pada periode pengamatan yaitu periode 2004-2015. Kemudian dalam penelitian ini pembuktian kurva U Terbalik yaitu dengan menghubungkan antara Pertumbuhan PDRB pada kawasan Mamminasata yaitu Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar dengan angka indeks Entropy theil.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Gambaran umum penelitian terdiri atas kondisi geografis dan kondisi ketenagakerjaan dan pendidikan masing-masing Kabupaten/Kota daerah penelitian.

1. Kota Makassar

Kota Makassar merupakan ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar mempunyai posisi yang sangat strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar terletak antara $119^{\circ} 24' 17'' 38''$ bujur timur dan $5,8^{\circ} 6' 19''$ lintang selatan yang berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Luas Kota Makassar adalah $175,77 \text{ km}^2$ atau sekitar 0,38 dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kecamatan yang ada di Kota Makassar adalah Biringkanaya, Bontoala, Makassar, Mamajang, Manggala, Mariso, Panakukang, Rappocini, Tallo, Tamalanrea, Tamalate, Ujung Pandang, Ujung Tanah dan Wajo. Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam Provinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan

Barat ke Wilayah Kawasan Timur Indonesia dan dari Wilayah Utara ke Wilayah Selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah Kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di Selatan kota. Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km².

Penduduk Kota Makassar dalam kurun waktu 2012 hingga 2015 lebih dominan bekerja pada sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan, hotel serta sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Namun pada sektor perdagangan besar, eceran rumah makan, dan hotel mengalami penurunan pada tahun 2014 yaitu sebesar 160.556 yang awalnya pada tahun 2013 mencapai 195.725 penduduk.

2. Kabupaten Maros

Kabupaten Maros terletak dibagian barat Provinsi Sulawesi Selatan, antara 40°45"-50°07" lintang selatan dan 109°206"-129 °12" bujur timur yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Luas wilayah Kabupaten Maros 1.619,12 km² yang secara administrasi pemerintahannya terdiri atas 14 kecamatan dan 103 desa/kelurahan. Kecamatan yang ada adalah Bantimurung, Bontoa, Camba, Cenrana, Lau, Mallawa, Mandai, Maros, Barru, Marusu, Moncongloe, Simbang, Tanralili, Tompobulu dan Turikale.

Kabupaten Maros merupakan Kabupaten yang berbasis pertanian, hal ini terlihat dengan total angkatan kerja yang bekerja selama empat tahun berturut-turut dimulai dari tahun 2012 hingga 2015 paling banyak bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan. Pada tahun 2013 data total pekerja yang ada sebesar 126.605 dan diantaranya sebesar 126.605 orang bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan. Kemudian dua sektor lainnya yang juga menyerap tenaga kerja yang lumayan besar adalah sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan, hotel dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perumahan.

3. Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa berada pada 119.3773° bujur barat dan 120.0317° bujur timur, 50829342862° lintang utara dan 5.577305437° lintang selatan. Kabupaten yang berada di daerah selatan dari Sulawesi Selatan merupakan daerah otonom ini berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kota Makassar dan Kabupaten Maros.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng
- c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 Kecamatan dan 167 desa/kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 km² atau samadengan 3.01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Mamuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungayya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu.

Kabupaten Gowa bisa digolongkan sebagai Kabupaten yang cukup luas, sehingga jumlah angkatan kerja yang ada juga lumayan besar. Pada tahun 2012 data Badan Pusat Statistik menunjukan jumlah angkatan kerja Kabupaten Gowa yang bekerja adalah 269.407 orang. Selama tiga tahun berikutnya jumlah angkatan kerja terus mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2013 sebesar 277.060 orang, tahun 2014 sebesar 273.211 orang dan pada tahun 2015 sebesar 297.347 orang. Penduduk yang bekerja di Kabupaten Gowa pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan pada tahun 2014 sebesar 118.009 orang dan mengalami peningkatan sebesar 142.509 orang pada tahun 2015.

4. Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar yang beribukota di Patalassang terletak antara 5°3'5" 38" lintang selatan dan 119° 22"-119 ° 39" bujur timur, secara administrasi yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- b. Sebelah Barat dan Selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan laut Flores.

Luas wilayah Kabupaten Takalar tercatat 566,51 km². Terdiri dari sembilan kecamatan dan 100 wilayah desa/kelurahan. Jarak ibu Kota Kabupaten Takalar

dengan ibu Kota Provinsi Sulawesi selatan mencapai 45 km yang melalui Kabupaten Gowa. Kecamatan Manggarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Patalassang, Kecamatan Galesong, Kecamatan Sanrobone.

Jumlah penduduk Kabupaten Takalar dari tahun 2004 hingga tahun 2015 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ketahun, data Badan Pusat Statistik menunjukan bahwa jumlah penduduk pada tahun 2004 sebesar 244.582 juta jiwa penduduk dan pada tahun tahun 2015 sebesar 286.906 juta jiwa, dengan kenaikan jumlah penduduk dari tahun ketahun tidak di imbangi dengan kenaikan jumlah penduduk yang bekerja, data BPS menunjukan bahwa tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2004 hingga 2006 mengalami keadaan yang fluktuatif yaitu pada tahun 2004 data tingkat pengangguran sebesar 11,15 persen kemudian pada tahun 2005 sebesar 9,97 persen dan pada tahun 2006 mengalami peningkatan yaitu sebesar 11,52 persen.

Mata pencaharian masyarakat Kabupaten Takalar cenderung pada sektor pertanian/nelayan sebesar 80% lain-lain 20%. Sebagai wilayah pesisir yang juga telah difasilitasi dengan pelabuhan walaupun masih pelabuhan sederhana maka Kabupaten Takalar memiliki akses perdagangan regional nasional bahkan internasional. Keunggulan geografis ini menjadikan Takalar sebagai alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal. Dengan fasilitas pelabuhan yang ada, Takalar memiliki potensi akses regional maupun nasional sebagai pintu masuk baru untuk

kegiatan industri dan perdagangan untuk kawasan Indonesia Timur setelah Makassar mengalami kejenuhan.

B. Deskripsi Antar Variabel

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh, maka dengan itu peneliti dapat menggambarkan variabel-variabel yang masuk dalam penelitian ini dimana variabel independen adalah aglomerasi, desentralisasi fiskal dan tingkat penggagguran terbuka yang mempengaruhi variabel dependen yaitu ketimpangan pembangunan. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Ketimpangan Pembangunan

Hipotesa Neo-klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun (Sjafrizal, 2008).

Besar kecilnya ketimpangan PDRB perkapita antar Kabupaten/Kota memberikan gambaran tentang perkembangan pembangunan di Kabupaten/Kota di kawasan Mamminasata. Untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang kondisi dan perkembangan pembangunan daerah di kawasan Mamminasata akan di bahas seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan yang dilihat dari PDRB perkapita dan jumlah penduduk Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa

dan Kabupaten Takalar, kemudian dianalisis menggunakan indeks ketimpangan Entropy Theil.

Indeks Entropy Theil memungkinkan kita untuk membuat perbandingan selama kurun waktu tertentu. Karakteristik utama dari indeks Entropy Theil ini adalah kemampuannya untuk membedakan ketimpangan antar wilayah dan menyediakan pengukuran ketimpangan secara rinci dalam sub unit georafis selama periode tertentu, sedangkan yang lebih penting ketika kita mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai ketimpangan sosial. Berikut adalah hasil dari perhitungan indeks entropy theil:

Tabel 4.1
Perkembangan Indeks Entropy Theil di Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar Tahun 2004 – 2015

Tahun	Indeks Entropy Theil (Persen)			
	Makassar	Maros	Gowa	Takalar
2004	1,2537	0,5450	0,8007	0,4941
2005	1,2677	0,5223	0,8103	0,4984
2006	1,2741	0,5186	0,7990	0,5005
2007	1,2983	0,5039	0,7721	0,4976
2008	1,3394	0,4858	0,7323	0,4845
2009	1,3611	0,4753	0,7156	0,4769
2010	1,3851	0,4759	0,6596	0,4714
2011	1,3994	0,4661	0,6726	0,4603
2012	1,4305	0,4660	0,5976	0,4561
2013	1,4346	0,4741	0,5712	0,4544
2014	1,1394	0,9432	0,4686	0,3953
2015	1,1320	0,9583	0,4456	0,4014

Sumber : Data Sekunder Diolah 2017

Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari ke empat Kabupaten/Kota di kawasan Mamminasata, Kota Makassar memiliki tingkat ketimpangan yang sangat tinggi yaitu

mencapai nilai ketimpangan 1 menurut indeks entropy theil, ketimpangan di Kota Makassar setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun pada dua tahun terakhir pada tahun 2014 dan 2015 ketimpangan di Kota Makassar menurun yaitu pada tahun 2013 sebesar 1,4346 turun pada tahun 2014 menjadi 1,1394 dan pada tahun 2015 sebesar 1,1320. Nilai tingkat ketimpangan di Kota Makassar pada dua tahun terakhir menurun karena perubahan tahun dasar produk domestik regional bruto, dimana pada tahun 2014 dan tahun 2015 menggunakan tahun dasar 2010 sedangkan pada tahun 2004 sampai pada tahun 2013 menggunakan tahun dasar 2000.

Ketimpangan di Kabupaten Maros berbeda dengan Kota Makassar, dimana setiap tahunnya ketimpangan di Kabupaten Maros terus mengalami penurunan, namun pada tiga tahun terakhir ketimpangan justru melebar yaitu pada tahun 2013 2014 dan tahun 2015. Pada tabel 4.1 menunjukan bahwa kenaikan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,9432 dan tahun 2015 0,9583 sedangkan pada tahun sebelumnya pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,4741. Berbeda dengan Kota Makassar, dimana pada Kabupaten Maros dengan perubahan tahun dasar justru akan memperlebar ketimpangan atau bisa di katakan ketimpangan semakin tinggi.

Ketimpangan di Kabupaten Gowa dari tahun 2004 sampai pada tahun 2015 terus mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2011 ketimpangan di Kabupaten Gowa mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,6726 sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2010 sebesar 0,6596 dan pada tahun selanjtnya terus mengalami penurunan ketimpangan, walaupun ketimpangan di Kabupaten Gowa

terus mengalami penurunan, tetapi nilai ketimpangan di Kabupaten Gowa mendekati ketimpangan yang tinggi.

Tabel 4.1 diketahui bahwa diantara ke empat Kabupaten/Kota yang berada di kawasan Mamminasata, Kabupaten Takalar memiliki nilai ketimpangan yang rendah. Ketimpangan di Kabupaten Takalar pada tiga tahun awal terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2004 sebesar 0,4941, tahun 2005 sebesar 0,4984 dan tahun 2006 sebesar 0,5005. Kemudian pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2007 sampai pada tahun 2014 ketimpangan terus mengalami penurunan.

Pengukuran ketimpangan dengan menggunakan indeks entropy theil yaitu jika mendekati 0 artinya daerah tersebut sangat merata sedangkan jika mendekati 1 artinya sangat timpang. Jika dilihat dari tabel 4.1 ketimpangan yang cukup tinggi terjadi di Kota Makassar dan nilai ketimpangan yang rendah terjadi di Kabupaten Takalar hal ini mengindikasikan bahwa setiap kabupaten/kota memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pembangunan pada setiap kabupaten/kota tersebut tidak bisa diterima secara merata maka dari itulah ketimpangan di atas cukup tinggi.

Salah satu penyebab ketimpangan Kota Makassar memiliki ketimpangan yang cukup tinggi dibanding dengan ketiga Kabupaten Lainnya yaitu dengan adanya KIMA yang terletak di Kota Makassar, dengan adanya KIMA maka akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak, salah satu kabupaten yang dekat dengan KIMA yaitu Kabupaten Maros, banyak dari penduduk Kabupaten Maros yang siap bekerja di KIMA, kemudian banyak hasil produk yang dihasilkan dari Kabupaten

Gowa dan Takalar yang di pasarkan di Kota Makassar, misalnya beberapa pusat perbelanjaan baik tradisional maupun modern.

2. Aglomerasi

Sjafrizal (2008) mengatakan terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Konsentrasi ekonomi ini tercermin dalam kegiatan aglomerasi. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. berikut adalah perkembangan Aglomerasi yang dijelaskan pada tabel 4.2:

Tabel 4.2
Perkembangan Aglomerasi Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar Tahun 2004 – 2015

Tahun	Aglomerasi (Persen)			
	Makassar	Maros	Gowa	Takalar
2004	0,2188	0,0191	0,0289	0,0142
2005	0,2026	0,0170	0,0264	0,0129
2006	0,1862	0,0151	0,0239	0,0117
2007	0,2966	0,0232	0,0373	0,0182
2008	0,3041	0,0228	0,0370	0,0179
2009	0,3127	0,0228	0,0377	0,0180
2010	0,0946	0,0067	0,0110	0,0053
2011	0,0959	0,0067	0,0112	0,0053
2012	0,0968	0,0066	0,0107	0,0052
2013	0,0980	0,0067	0,0107	0,0052
2014	0,3530	0,0430	0,0415	0,0194
2015	0,3539	0,0436	0,0414	0,0197

Sumber : Data Sekunder Diolah tahun 2017

Perkembangan aglomerasi pada tabel 4.2 menjelaskan bahwa dari ke empat Kabupaten/Kota yang berada di kawasan Mamminasata, Kota Makassar yang memiliki nilai tertinggi dalam hal aglomerasi, kemudian Kabupaten Takalar memiliki nilai aglomerasi yang rendah. Salah satu alasan mengapa nilai aglomerasi pada Kota Makassar memiliki nilai yang cukup tinggi disebabkan karena Kota Makassar memiliki kawasan industri KIMA dimana jika pemerintah dapat terus mempromosikan investasi lebih lanjut pada industri tersebut dan sejalan dengan pembangunan pelabuhan pada Kota Makassar maka di lain pihak pemerintah mendapat keuntungan.

Tingkat aglomerasi pada tabel 4.2 menjelaskan bahwa pada kawasan Mamminasata rata-rata dari tahun 2004 sampai pada tahun 2015 menunjukkan angka yang cukup besar. Hal tersebut disebabkan karena terkonsentrasinya kegiatan perekonomian yang cukup tinggi pada kabupaten/kota tertentu saja yang akan mendorong pertumbuhan daerah yang cenderung lebih cepat, sedangkan pada wilayah yang memiliki konsentrasi kegiatan perekonomian yang rendah akan mendorong pengangguran yang tinggi dan pendapatan yang rendah dan sebab itu akan terjadi ketimpangan pada wilayah tersebut.

Konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadi pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah yang cukup tinggi akan cenderung mendorong meningkatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah sebab

proses pembangunan daerah akan lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi.

3. Desentralisasi Fiskal

Pengeluaran pemerintah daerah diperoleh dari sumber-sumber penerimaan daerah, maka disaat pendapatan per kapita masyarakat meningkat maka akan mendorong penerimaan daerah yang merupakan indikator derajat desentralisasi fiskal suatu daerah meningkat. Maka dapat dideskripsikan bahwa peningkatan derajat desentralisasi fiskal akan mendorong peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik sehingga akan mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Adapun perkembangan Desentralisasi fiskal 4 Kabupaten/Kota di Mamminasata dapat dilihat pada tabel 4.3 yaitu:

Tabel 4.3
Perkembangan Desentralisasi Fiskal Kota Makassar, Kabupaten Maros,
Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar Tahun 2004 – 2015

Tahun	Desentralisasi Fiskal (Persen)			
	Makassar	Maros	Gowa	Takalar
2004	0,1562	0,0642	0,0717	0,0227
2005	0,1653	0,0647	0,0683	0,0267
2006	0,1458	0,0575	0,0737	0,0263
2007	0,1451	0,0575	0,0597	0,0259
2008	0,1417	0,0584	0,0644	0,0322
2009	0,1398	0,0672	0,0726	0,0332
2010	0,1271	0,0790	0,0754	0,0252
2011	0,1834	0,0723	0,0972	0,0296
2012	0,2453	0,0648	0,0988	0,0547
2013	0,3119	0,1168	0,1011	0,0598
2014	0,2548	0,1187	0,1204	0,0821
2015	0,3360	0,1289	0,0905	0,1075

Sumber : Data Sekunder Diolah 2017

Tabel 4.3 perkembangan desentralisasi fiskal di Kota Makassar mengalami keadaan yang fluktuatif dari tahun 2004 sampai pada tahun 2015, dengan menggunakan kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal, dari tahun 2004 sampai pada tahun 2011 kemampuan keuangan daerah yang dimiliki Kota Makassar dalam kategori kurang. Namun, pada tahun 2013 sampai pada tahun 2015 kemampuan keuangan daerah Kota Makassar mencapai pada tahap sedang.

Kemampuan keuangan daerah yang dimiliki Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa setara, pada tabel 4.3 dari tahun 2004 sampai pada tahun 2012 kemampuan keuangan daerah Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa berada pada tahap kemampuan keuangan yang sangat kurang yaitu berkisar 0 – 10%. Namun pada tahun 2013 sampai pada tahun 2015 kemampuan keuangan kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa mengalami kenaikan satu tingkat penilaian yaitu berada pada tahap kemampuan keuangan yang kurang. Selanjutnya pada Kabupaten Takalar mempunyai tingkat kemampuan keuangan daerah yang sangat kurang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di kawasan Mamminasata.

Sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 33 tahun 2004, pengertian desentralisasi dinyatakan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kuncoro, 2009). Artinya desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab (akan fungsi-fungsi publik) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pengukuran derajat

desentralisasi fiskal dapat dilakukan melalui analisis rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD).

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat daerah. Tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih rendah, demikian pula sebaliknya, indikator ini sangat penting bagi Indonesia sebagai negara dengan penduduk besar sehingga penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak merupakan sasaran utama pembangunan daerah yang bersifat strategis (Sjafrizal, 2008). Berikut adalah perkembangan TPT pada tabel 4.4:

Tabel 4.4
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar Tahun 2004 – 2015

Tahun	TPT (Persen)			
	Makassar	Maros	Gowa	Takalar
2004	18,13	16,17	17,79	11,15
2005	15,04	14,61	15,33	9,97
2006	14,03	13,54	16,83	11,02
2007	18,00	12,20	13,00	12,40
2008	11,76	9,37	9,74	9,76
2009	12,90	11,60	9,60	9,20
2010	13,34	9,74	7,75	7,57
2011	8,41	6,94	7,05	5,54
2012	9,97	6,43	4,01	6,21
2013	9,53	5,71	2,63	2,73
2014	10,90	4,60	2,30	2,70
2015	11,28	4,98	3,09	3,21

Sumber : Data Sekunder Diolah 2017

Tabel 4.4 dijelaskan perkembangan tingkat pengangguran terbuka di kawasan Mamminasata. Pada Kota Makassar tingkat pengangguran mengalami keadaan yang fluktuatif, penurunan angka pengangguran yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 8,41 persen yang pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2010 sebesar 13,34 persen, kemudian pada tahun selanjutnya terus mengalami peningkatan setiap tahun nya. Kabupaten Maros tingkat pengangguran dari tahun 2004 sampai pada tahun 2008 terus mengalami penurunan pengangguran. Jumlah pengangguran pada tahun 2008 sebesar 9,37 persen dan pada tahun 2009 jumlah pengangguran di Kabupaten Maros mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 11,60 persen, kemudian pada tahun selanjutnya terus mengalami penurunan.

Tingkat pengangguran di Kabupaten Gowa dari tahun 2004 sampai pada tahun 2015 terus mengalami penurunan setiap tahun nya, tabel 4.4 menjelaskan bahwa penurunan tingkat pengangguran yang paling tinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 9,74 persen. Pada Kabupaten Takalar tingkat pengangguran terbuka terus mengalami penurunan dari tahun 2008 sampai pada tahun 2015. Dan jumlah pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 12,40 persen.

Penyebab meningkatnya angka pengangguran di Kota Makassar salah satunya ialah para pekerja lebih dominan bekerja pada sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan, padahal total dari sumbangan pembentukan PDRB terbesar disumbang pada sektor industri pengolahan, rendahnya daya serap tenaga kerja pada sektor industri pengolahan menjadi salah satu sebab meningkatnya pengangguran di Kota Makassar, selain itu banyak dari penduduk Kota Makassar lebih memilih untuk

melanjutkan pendidikan nya, hal tersebut tentu saja sangat bagus jika dilihat dari sisi pendidikan namun tidak pada sisi penganggurannya.

Keadaan pengangguran Kabupaten Maros terus mengalami penurunan salah satu penyebabnya yaitu dengan naiknya pertumbuhan ekonomi, selain itu di Kabupaten Maros banyak berdiri pabrik-pabrik yang dampaknya akan menyerap tenaga kerja lebih banyak dan pengangguran akan menurun. Sama halnya dengan Kabupaten Maros, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa dapat menekan angka pengangguran di Kabupaten Gowa, selain daripada itu pembangunan wisata diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan menaikkan investasi.

Keadaan pengangguran di Kabupaten Takalar mengalami penurunan disebabkan oleh naiknya pertumbuhan ekonomi sebesar 6,19 persen pada tahun 2008 meningkat pada tahun 2009 sebesar 6,58 persen dan pendapatan perkapita meningkat sebesar 313.365 juta pada tahun 2008 menjadi 330.346 juta pada tahun 2009. Hal tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan menurunnya angka pengangguran sebesar 9,76 pada tahun 2008 menjadi 9,20 pada tahun 2009.

C. Hasil Pengolahan Data

1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian regresi data panel terhadap hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengujian untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik. Hasil pengujian hipotesis yang terbaik

adalah pengujian yang tidak melanggar asumsi-asumsi klasik yang mendasari model regresi linear berganda. Asumsi-asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Metode yang dapat dipakai untuk normalitas antara lain: analisis grafik dan analisis statistik.

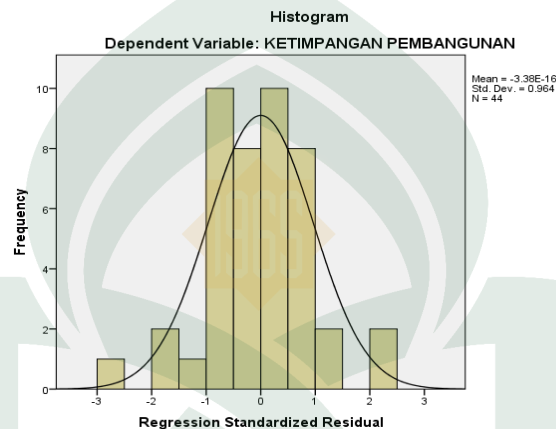
Uji normalitas selain menggunakan grafik, juga menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov merupakan uji normalitas menggunakan fungsi distribusi kumulatif, jadi selain menggunakan analisis grafik dan statistik, penelitian ini juga menggunakan uji normalitas dengan kolmogorov-smirnov, dan hasil nya pada tabel one-sample kolmogorov-smirnov test.

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis grafik. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya:

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal regresi memenuhi asumsi normalitas.

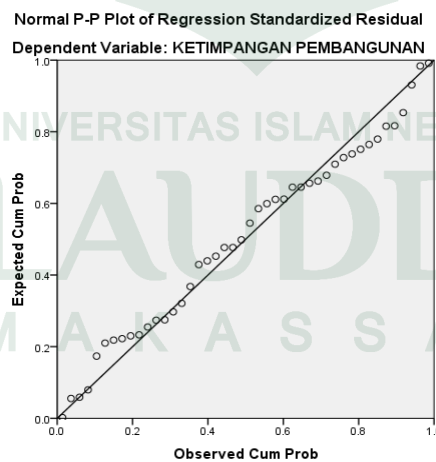
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.1
Grafik Histogram



Sumber : Output SPSS 21 (Data Sekunder diolah, 2017)

Gambar 4.2
Grafik Normal P-Plot



Sumber : Output SPSS 21 (Data Sekunder diolah, 2017)

Berdasarkan gambar 4.1 gambar histogram terlihat bahwa pola distribusi mendekati normal, karena data mengikuti arah garis grafik histogramnya dapat diketahui bahwa uji normalitas terpenuhi. Gambar 4.2 Normal Probability Plot menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal (membentuk garis lurus) dan menunjukkan pola distribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi dan layak dipakai untuk memprediksi variabel aglomerasi, desentralisasi fiskal dan tingkat pengangguran terbuka berdasarkan variabel tingkat ketimpangan pembangunan.

Uji normalitas menggunakan uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov merupakan uji normalitas menggunakan fungsi distribusi kumulatif, dan hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,17976579
	Absolute	,113
Most Extreme Differences	Positive	,113
	Negative	-,075
Kolmogorov-Smirnov Z		,786
Asymp. Sig. (2-tailed)		,568

Sumber : Output SPSS 21 (Data Sekunder diolah, 2017)

Berdasarkan hasil output spss 21 menggunakan uji normalitas dengan kolmogorov-smirnov terlihat bahwa nilai Sig.(2-tailed) sebesar 0,568. Yang artinya

lebih besar dari taraf signifikan 0,05 ($0,568 > 0,05$). Hal itu berarti nilai residual terstandarisasi dinyatakan menyebar secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti terjadi korelasi linear yang mendekati sempurna antar lebih dari dua variabel bebas. Uji multikoloniearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi variabel bebas (independen). Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen sama dengan nol. Gejala multikoloniearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation faktor* (VIF). Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung multikolinier.

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1 / tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikoloniearitas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan $VIF > 10$. Seperti yang tertera pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Aglomerasi	.427	2.341
	Desentralisasi fiskal	.501	1.997
	Tingkat pengangguran terbuka	.748	1.338

a. Dependent Variabel: Ketimpangan Pembangunan
Sumber : Output SPSS 21 (Data Sekunder, Diolah 2017)

Berdasarkan tabel 4.6 maka dapat diketahui nilai VIF untuk masing-masing variabel penelitian sebagai berikut:

- 1) Nilai VIF untuk variabel aglomerasi sebesar $2,341 < 10$ dan nilai toleransi sebesar $0,427 > 0,10$ sehingga variabel aglomerasi dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.
- 2) Nilai VIF untuk desentralisasi fiskal sebesar $1,997 < 10$ dan nilai toleransi sebesar $0,501 > 0,10$ sehingga variabel desentralisasi fiskal dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas.
- 3) Nilai VIF untuk tingkat pengangguran terbuka sebesar $1,338 < 10$ dan nilai toleransi sebesar $0.748 > 0,10$ sehingga variabel tingkat pengangguran terbuka dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena *residual* (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya, selain itu yaitu adanya kelembapan, bias spesifikasi model kasus variabel yang tidak dimasukkan, adanya fenomena alaba-laba manipulasi data, dan yang terakhir yaitu adanya kelembapan waktu.

Salah satu untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu Uji *Durbin-Watson* (DW tes). Uji *Durbin Watson* digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel independen. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi.

Deteksi autokorelasi yaitu dengan cara :

Jika $dw < dL$: maka terdapat autokorelasi positif

Jika $dw > Du$: maka tidak terdapat autokorelasi positif

Jika $dL > dw > Du$: maka pengujian tidak dapat disimpulkan

Jika $(4 - dw) < dL$: maka terdapat autokorelasi negatif.

Jika $(4 - dw) > dU$: maka pengujian tidak terdapat autokorelasi negatif.

Jika $dL < (4-dw) < dU$: maka pengujian tidak terdapat kesimpulan.

Tabel 4.7
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	Change Statistics		Durbin-Watson
	df2	Sig. F Change	
1	40	.000	.531

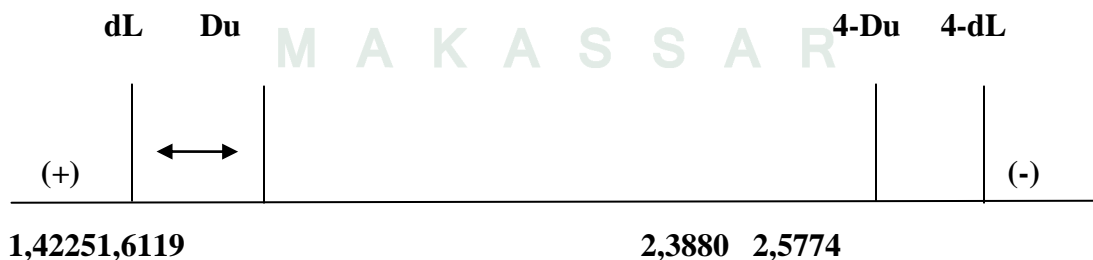
Sumber : Output SPSS 21 (Data Sekunder, Diolah 2017)

Perhitungan yang dilakukan untuk mengukur proporsi atau persentase dari variasi total variabel ketimpangan yang mampu dijelaskan oleh model regresi. Dari tabel diatas dilihat nilai *Durbin Watson* sebesar 0,531 selanjutnya akan bandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%. Berdasarkan klasifikasi nilai DW yaitu $\alpha = 5\%$, $k = 3$, $n = 44$, maka diperoleh hasil dari tabel DW sebagai berikut:

dL : 1,4225 4-dL : 2,5774

Du : 1,6119 4-Du : 2,3880

Gambar 4.3 Uji Durbin Watson



Tabel 4.7 nilai Durbin Watson menunjukkan nilai 0,531, nilai dL sebesar 1,4225 dan nilai Du sebesar 1,6119 jika dilihat dari gambar 4.3 maka dapat disimpulkan bahwa nilai DW berada sebelah dL yang artinya yaitu ada gangguan Autokorelasi positif, dan jelas terlihat bahwa nilai $DW < dL$ yang artinya terjadi autokorelasi positif. Karena regresi mengandung masalah autokorelasi positif maka diperlukan tindakan perbaikan. Untuk melakukan perbaikan digunakan *cochrane orcutt*, dari hasil regresi tersebut di peroleh hasil dari metode *cochrane orcutt* sebagai berikut:

Tabel 4.8
Uji Autokorelasi

Model Summary^{c,d}			
Model	Change Statistics		Durbin-Watson
	df2	Sig. F Change	
1	44	,000	1,598

Sumber : Output SPSS 21 (Data Sekunder, Diolah 2017)

Tabel 4.8 nilai durbin watson dengan menggunakan metode *cochrane orcutt* menunjukkan nilai 1,598, nilai dL sebesar 1,4500 dan nilai Du sebesar 1,6230 jika dilihat dari uji durbin watson, nilai DW berada di antara dL dan Du dan jelas terlihat bahwa nilai $dL < dw < Du$ yang artinya pengujian tidak dapat disimpulkan.

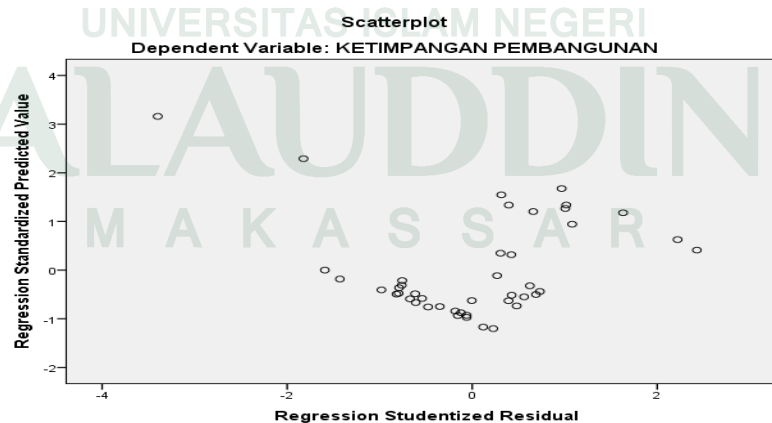
d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Model

regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis grafik, yaitu melihat grafik *scartter plot* antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID, dimana sumbu y adalah y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual ($y \text{ prediksi} - y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-studentized. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.4
Uji Heteroskedasitisitas



Sumber: Output SPSS 21 (Data Sekunder Diolah, 2017)

Berdasarkan Gambar 4.4 scatterplot diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas dan model ini layak dipakai untuk memprediksi pengaruh variabel ketimpangan pembangunan berdasarkan masukan variabel agmolerasi, desentralisasi fiskal dan tingkat pengangguran terbuka.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Perbedaan dalam analisis regresi sederhana terletak pada jumlah variabel tergantung hanya satu. Analisis regresi berganda ada beberapa hal yang dianalisis sebagai dasar untuk melakukan analisis lebih mendalam dari sekedar persamaan regresi yang terbentuk, beberapa hal yang perlu dianalisis berkaitan dengan analisis regresi yaitu persamaan regresi, koefisien determinasi, kesalahan baku estimasi, kesalahan baku koefisien regresi, nilai F hitung dan nilai t hitung.

Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji coefisient berdasarkan output SPSS versi 21 variabel aglomerasi, desentralisasi fiskal dan tingkat pengangguran terbuka terhadap variabel ketimpangan pembangunan yang ditunjukkan pada tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Analisis Regresi

Variabel	Koefisien Regresi	T hitung	Sig
	(B)		
(constant)	0,328	3,684	0,001
Aglomerasi	1,150	2,544	0,015
Desentralisasi fiskal	2,280	3,839	0,000
Tingkat pengangguran terbuka	0,013	1,636	0,110
R : 0,836 R Square : 0,698 F Hitung : 30,876 Signifikansi F : 0,000			

a. Predictors: (Constant), tingkat pengangguran terbuka, aglomerasi, desentralisasi fiskal

b. Dependent Variable: Ketimpangan Pembangunan

Sumber : Output SPSS 21 (Data Sekunder Diolah, 2017)

Berdasarkan pada tabel 4.9 terlihat bahwa nilai konstanta β_0 sebesar 0,328 dan koefisien regresi β_1 sebesar 1,150, β_2 sebesar 2,280 dan β_3 sebesar 0,013. Nilai konstanta dan koefisien regresi (β_0 , β_1 , β_2 , β_3) ini dimasukkan dalam persamaan regresi linier berganda berikut ini:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu$$

Sehingga persamaan regresinya menjadi sebagai berikut:

$$Y = 0,328 + 1,150X_1 + 2,280X_2 + 0,013X_3 + 0,089$$

Dari persamaan regresi berganda tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

a. Nilai Konstanta (β_0)

Nilai konstanta sebesar 0,328 berarti jika Aglomerasi (X_1), Desentralisasi Fiskal (X_2), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (X_3) nilainya 0 atau konstan maka Tingkat Ketimpangan (Y) nilainya sebesar 0,328.

b. Aglomerasi (X_1)

Nilai konstanta regresi aglomerasi sebesar 1,150 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% aglomerasi maka akan menyebabkan peningkatan tingkat ketimpangan sebesar 1,150. Dan sebaliknya jika aglomerasi berkurang 1% maka akan menyebabkan penurunan terhadap tingkat ketimpangan di kawasan Mamminasata sebesar 1,150. Arah hubungan antara aglomerasi dengan ketimpangan pembangunan adalah searah (+), dimana kenaikan nilai aglomerasi meningkat akan mengakibatkan kenaikan pula terhadap ketimpangan begitu pula sebaliknya dimana penurunan nilai aglomerasi akan mengakibatkan penurunan pula pada ketimpangan di kawasan Mamminasata.

c. Desentralisasi Fiskal (X_2)

Nilai konstanta regresi desentralisasi fiskal sebesar 2,280 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% tingkat desentralisasi fiskal maka akan menyebabkan peningkatan tingkat ketimpangan sebesar 2,280. Begitu pula sebaliknya, setiap penurunan 1% tingkat desentralisasi fiskal maka akan menyebabkan penurunan tingkat ketimpangan sebesar 2,280. Arah hubungan antara aglomerasi dengan ketimpangan pembangunan adalah searah (+), dimana kenaikan nilai desentralisasi

fiskal akan mengakibatkan peningkatan pula terhadap ketimpangan di kawasan Mamminasata.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (X_3)

Nilai konstanta regresi tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,013 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1% tingkat pengangguran terbuka maka akan menyebabkan peningkatan pula pada tingkat ketimpangan pembangunan di kawasan Mamminasata sebesar 0,013, begitu pula sebaliknya. Arah hubungan antara tingkat pengangguran terbuka dengan tingkat ketimpangan pembangunan yaitu searah (+), dimana kenaikan nilai tingkat pengangguran terbuka akan mengakibatkan peningkatan pula terhadap ketimpangan di kawasan Mamminasata.

3. Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R^2).

Koefisien korelasi (R) pada dasarnya merupakan nilai yang menunjukkan tentang adanya hubungan antara dua variabel atau lebih serta besarnya hubungan variabel tersebut. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Saat nilai koefisien mendekati satu, berarti kemampuan variabel-variabel independen menunjukkan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Berdasarkan output SPSS 21 tabel 4.9 terlihat bahwa hasil dari perhitungan yang diperoleh nilai R sebesar 0,836 dengan kata lain hubungan antara variabel X yaitu aglomerasi, desentralisasi fiskal dan tingkat pengangguran terbuka terhadap variabel Y yaitu tingkat ketimpangan pembangunan sebesar 0.836 atau sebesar

83,6%. Berarti bahwa 16,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak di jelaskan dalam penelitian ini. Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.698 dengan kata lain hal ini menunjukkan bahwa besar persentase variasi tingkat ketimpangan pembangunan yang bisa dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel bebas yaitu aglomerasi, desentralisasi fiskal, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 69,8% sedangkan sisanya sebesar 30,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya diluar penelitian ini seperti variabel inflasi dan investasi.

4. Uji Hipotesis

a. Uji F

Hipotesis simultan dalam peneitian ini adalah diduga bahwa aglomerasi (X_1) desentralisasi fiskal (X_2) dan tingkat pengangguran terbuka (X_3) berpengaruh secara simultan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan (Y). Dengan kriteria penerimaan dan penolakan sebagai berikut:

H_0 : tidak ada pengaruh secara simultan aglomerasi (X_1) desentralisasi fiskal (X_2) dan tingkat pengangguran terbuka (X_3) terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di kawasan Mamminasata.

H_a : ada pengaruh secara simultan aglomerasi (X_1) desentralisasi fiskal (X_2) dan tingkat pengangguran terbuka (X_3) terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di kawasan Mamminasata.

Untuk mengetahui H_0 dan H_a di tolak dan di terima, jika :

Nilai $P (.sig) > \alpha (0,05)$ H_0 diterima dan H_a ditolak.

Nilai $P (.sig) < \alpha (0,05)$ H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.9 diatas menunjukkan pengaruh variabel aglomerasi (X_1), desentralisasi fiskal (X_2) dan tingkat pengangguran terbuka (X_3) terhadap tingkat ketimpangan pembangunan (Y) dengan nilai F_{hitung} sebesar 30,876 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$).

Hal ini menunjukkan bahwa variabel aglomerasi, desentralisasi fiskal dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis diatas menolak H_0 dan menerima H_a hal ini menunjukkan bahwa aglomerasi, desentralisasi fiskal dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di kawasan Mamminasata.

b. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing atau secara parsial variabel aglomerasi, desentralisasi fiskal dan tingkat pengangguran terbuka terhadap variabel tingkat ketimpangan pembangunan. Uji t digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, dimana tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5%. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian parsial ini adalah sebagai berikut :

H_0 : tidak terdapat pengaruh variabel aglomerasi, desentralisasi fiskal dan tingkat pengangguran terbuka signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di kawasan Mamminasata

H_a : terdapat pengaruh variabel aglomerasi, desentralisasi fiskal dan tingkat pengangguran terbuka signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di kawasan Mamminasata.

Proses pengujian dilakukan dengan melihat pada tabel uji parsial dengan memperhatikan kolom signifikansi dan nilai t_{hitung} dan membandingkan dengan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ Adapun dasar pengambilan keputusan yaitu :

- a. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak H_a diterima.
- b. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima H_a ditolak

Sementara hasil perhitungan uji t ditunjukkan pada tabel 4.9 sebagai berikut:

Berdasarkan tabel 4.9 perhitungan uji t dapat dilihat hasil pengujian parsial terhadap masing-masing variabel aglomerasi, desentralisasi fiskal dan tingkat pengangguran terbuka secara parsial terhadap variabel tingkat ketimpangan pembangunan dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Uji Hipotesis Pengaruh Aglomerasi Terhadap ketimpangan pembangunan.

Berdasarkan tabel 4.9 nilai signifikansi untuk variabel aglomerasi (X_1) adalah 0,015 dinyatakan lebih kecil dari taraf $\alpha = 0,05$ ($0,015 < 0,05$). Hal ini ditunjukkan juga dengan nilai $t_{hitung} = 2,544$. Dari hasil tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel aglomerasi (X_1) mempunyai pengaruh positif dan

signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di kawasan Mamminasata.

Dengan demikian dalam penelitian ini menolak hipotesis H_0 dan menerima H_a .

2. Uji Hipotesis Pengaruh Desentralisasi Fiskal (X_2) Terhadap Ketimpangan Pembangunan

Berdasarkan tabel 4.9 nilai signifikansi untuk variabel desentralisasi fiskal (X_2) adalah 0,000 dinyatakan lebih kecil dari taraf $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Hal ini ditunjukkan juga dengan nilai $t_{hitung} = 3,839$. Dari hasil tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel desentralisasi fiskal (X_2) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di kawasan Mamminasata. Dengan demikian dalam penelitian ini menolak hipotesis H_0 dan menerima H_a .

3. Uji Hipotesis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (X_3) Terhadap Tingkat Ketimpangan Pembangunan

Berdasarkan tabel 4.9 terdapat nilai signifikansi untuk variabel tingkat pengangguran terbuka (X_3) adalah 0,110 dinyatakan lebih besar dari taraf $\alpha = 0,05$ ($0,110 > 0,05$). Hal ini ditunjukkan juga dengan nilai $t_{hitung} = 1,636$. Dari hasil tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka (X_3) mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di kawasan Mamminasata. Dengan demikian dalam penelitian ini menolak hipotesis H_a dan menerima H_0 .

5. Kurva U terbalik

Hipotesis Kuznet mengenai Kurva U-Terbalik menjelaskan bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata.

Tabel 4.10
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Di
Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
Tahun 2004 – 2015

Tahun	Makassar		Maros		Gowa		Takalar	
	PE	KP	PE	KP	PE	KP	PE	KP
2004	10,24	1,2537	2,17	0,5450	4,87	0,8007	4,47	0,4941
2005	7,16	1,2677	3,11	0,5223	5,74	0,8103	5,58	0,4984
2006	8,09	1,2741	4,33	0,5186	6,17	0,7990	5,91	0,5005
2007	8,11	1,2983	4,58	0,5039	6,19	0,7721	6,04	0,4976
2008	10,52	1,3394	5,61	0,4858	6,92	0,7323	6,19	0,4845
2009	9,20	1,3611	6,27	0,4753	7,99	0,7156	6,58	0,4769
2010	9,83	1,3851	7,03	0,4759	6,05	0,6596	6,85	0,4714
2011	9,65	1,3994	7,57	0,4661	6,20	0,6726	7,34	0,4603
2012	9,88	1,4305	8,00	0,4660	7,28	0,5976	7,40	0,4561
2013	8,91	1,4346	8,67	0,4741	7,78	0,5712	7,33	0,4544
2014	7,39	1,1394	5,23	0,9432	6,94	0,4686	9,00	0,3953
2015	7,44	1,1320	8,58	0,9583	6,80	0,4456	8,41	0,4014

Sumber : Data Sekunder Diolah Tahun 2017

PE : Pertumbuhan Ekonomi

KP : Ketimpangan Pembangunan

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar dari tahun 2004 sampai pada tahun 2015 terus mengalami keadaan yang fluktuatif, namun ketimpangan yang terjadi di Kota Makassar cenderung mengalami peningkatan, artinya setiap kenaikan dan penurunan pertumbuhan ekonomi tidak

berdampak pada ketimpangan di Kota Makassar. Kemudian pada Kabupaten Maros pertumbuhan ekonomi dari tahun 2004 sampai pada tahun 2013 terus mengalami peningkatan, tahun 2013 pertumbuhan ekonomi mencapai 8,67 kemudian pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi menurun yaitu sebesar 5,23 dan tahun selanjutnya mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi kembali. Namun itu tidak terjadi pada ketimpangan di Kabupaten Maros dari tahun 2004 sampai pada tahun 2012 ketimpangan terus mengalami penurunan dan tahun 2013 sampai pada tahun 2015 ketimpangan terus melebar, dengan kata lain di Kabupaten Maros setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan ketimpangan di Kabupaten Maros.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa mengalami keadaan yang fluktuatif, dari tahun 2004 sampai pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa terus mengalami peningkatan, pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi mencapai 7,99, kemudian tahun 2010 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi sebesar 6,05, dan tahun selanjutnya kembali mengalami kenaikan sampai pada tahun 2013.

Ketimpangan di Kabupaten Gowa dari tahun 2004 sampai pada tahun 2015 terus mengalami penurunan. Sama halnya dengan Kota Makassar artinya dalam setiap kenaikan atau pun penurunan pertumbuhan ekonomi maka tidak berdampak pada ketimpangan. Pada Kabupaten Gowa pertumbuhan ekonomi dari tahun 2004 sampai pada tahun 2015 terus mengalami peningkatan, sedangkan ketimpangan di Kabupaten Takalar pada tahun 2004 sampai pada tahun 2006 terus mengalami peningkatan,

kemudian tahun 2007 ketimpangan terus mengalami penurunan dan tahun selanjutnya ketimpangan kembali naik.

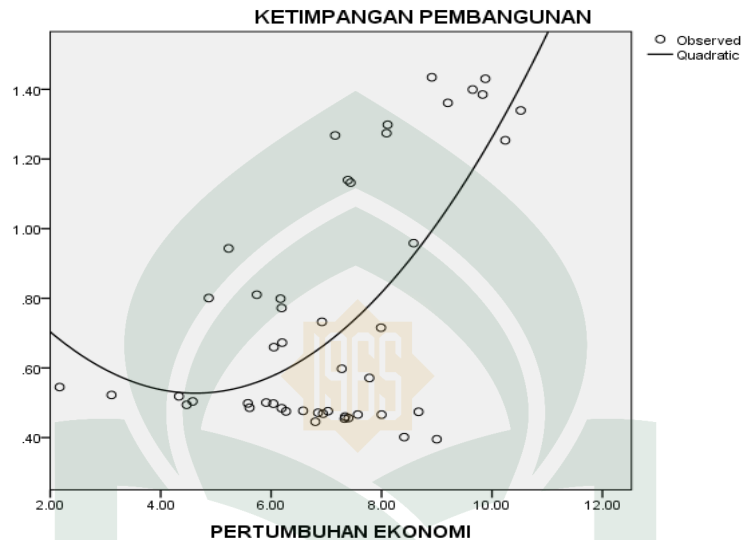
Tabel 4.11
Rata-Rata Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan
Pembangunan Di Kawasan Mamminasata Tahun 2004 – 2015

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Ketimpangan Pembangunan
2004	5,43	0,7733
2005	5,39	0,7746
2006	6,12	0,7730
2007	6,23	0,7679
2008	7,31	0,7605
2009	7,51	0,7572
2010	7,44	0,7480
2011	7,69	0,7496
2012	8,14	0,7375
2013	8,17	0,7335
2014	7,14	0,7366
2015	7,80	0,7343

Sumber : Data Sekunder Diolah Tahun 2017

Tabel 4.11 menunjukkan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2004 sampai pada tahun 2015 cenderung meningkat setiap tahun, namun tingkat ketimpangan setiap tahunnya mengalami keadaan yang fluktuatif yaitu dari tahun 2005 sampai pada tahun 2010 terus mengalami penurunan dan pada tahun selanjutnya mengalami peningkatan kembali kemudian tahun selanjutnya mengalami penurunan kembali, dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa setiap kenaikan pada pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dibarengi dengan kenaikan ketimpangan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi di kawasan Mamminasata justru akan mengurangi ketimpangan pembangunan.

Gambar 4.5
Kurva Hubungan Antara indeks Entropy Theil dan Pertumbuhan Ekonomi di
Kawasan Mamminasata



Gambar 4.5 merupakan hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi pada kawasan mamminasata. Gambar tersebut menunjukkan bahwa di kawasan Mamminasata tidak berlaku kurva u terbalik. Pada tahun 2005 sampai pada tahun 2011 ketimpangan di kawasan mamminasata terus mengalami penurunan. Namun pada tahun yang sama pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan. Hal tersebut berarti bahwa hipotesis kuznets mengenai kurva u terbalik tidak berlaku di kawasan Mamminasata.

D. Pembahasan

1. Ketimpangan Pembangunan

Dengan menggunakan analisis indeks entropy theil, ketimpangan di kawasan Mamminasata terlihat jelas pada Kota Makassar, dibanding ketiga Kabupaten

lainnya, dan ketimpangan yang paling rendah terletak pada Kabupaten Takalar, namun setiap Kabupaten/Kota lainnya memiliki usulan lokasi industri yang dapat dikembangkan agar ketimpangan antar Kabupaten/Kota tidak terlihat jelas dan pertumbuhan akan terus meningkat.

Kota Makassar seharusnya dapat memperluas kawasan industri (KIMA), salah satu caranya dengan menaikkan promosi dan menarik para investor dalam industri pengolahan kakao maupun industri pengolahan lainnya serta sejalan dengan pengembangan fasilitas pelabuhan di Kota Makassar. Kemudian Kabupaten Maros harus belajar lebih mengembangkan taman kawasan industrinya dengan memperhatikan lokasi industri perumahan, dengan menggunakan semen, batu marmer, kayu, dan bahan baku lainnya yang terdapat pada Kabupaten Maros. jika Kabupaten Maros dapat mengembangkan industri perumahannya maka persekonomian pada Kabupaten maros dapat berkembang dan dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi pada Kabupaten Maros.

Kabupaten Gowa memiliki industri yang dapat di kembangkan yaitu industri daur ulang yang merupakan salah satu strategi menaikkan pendapatan penduduk di Kabupaten Gowa, dengan naiknya pendapatan masyarakat maka akan mensejahterakan masyarakat. Dan yang terakhir Kabupaten Takalar memiliki potensi untuk mengembangkan kompleks industri pengolahan produk pertanian yang dikombinasikan dengan rehabilitasi pabrik gula yang ada. Pengolahan buah menjadi jus dan minuman lainnya, berbagai produk yang berasal dari kakao, dan vanilla untuk es krim dan produk-produk alam lainnya akan dihubungkan dengan produksi gula di

sekitarnya. Proses pengolahan rumput laut, kacang kedelai dan jagung dapat juga dipromosikan dalam kompleks industri pengolahan pertanian ini.

2. Pengaruh Aglomerasi, Desentralisasi Fiskal, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Ketimpangan Pembangunan

a. Pengaruh Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan

Dari hasil analisis data regresi variabel aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel tingkat ketimpangan pembangunan. Nilai signifikansi untuk variabel aglomerasi (X_1) adalah 0,015 dinyatakan lebih kecil dari taraf $\alpha = 0,05$ ($0,015 < 0,05$) dan Nilai konstanta regresi aglomerasi sebesar 1,150 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% aglomerasi maka akan menyebabkan peningkatan tingkat ketimpangan sebesar 1,150. Dan sebaliknya jika aglomerasi berkurang 1% maka akan menyebabkan penurunan terhadap tingkat ketimpangan di kawasan mamminasata sebesar 1,150. Arah hubungan antara aglomerasi dengan ketimpangan pembangunan adalah searah (+), dimana kenaikan nilai aglomerasi akan mengakibatkan kenaikan pula terhadap ketimpangan di kawasan mamminasata dan hasil penelitian tersebut sejalan dengan hipotesis.

Sjafrizal (2008) mengatakan terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Konsentrasi ekonomi ini tercermin dalam kegiatan aglomerasi. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cendeung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan

penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula sebaliknya, bilamana konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadi pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan penelitian Erza Agung yang berjudul pengaruh aglomerasi dan penanaman modal asing terhadap ketimpangan ekonomi antarwilayah, dimana variabel aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Erza menjelaskan Hal ini sejalan dengan Teori Kutub Pertumbuhan bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah dalam waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut sebagai pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda.

Perroux mengatakan bahwa, ditinjau dari aspek lokasinya pembangunan ekonomi di daerah tidak merata dan cenderung terjadi proses aglomerasi (pemusatan) pada pusat-pusat pertumbuhan. Pada nantinya pusat-pusat pertumbuhan tersebut akan mempengaruhi daerah yang lambat perkembangannya, terjadinya aglomerasi tersebut memiliki manfaat-manfaat tertentu yaitu keunggulan secara ekonomis (usaha dalam jumlah besar) dan keuntungan penghematan biaya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Endah yang berjudul analisis pengaruh aglomerasi, tenaga kerja, dan icor terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di DIY.

b. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pembangunan

Hasil analisis data regresi variabel desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel tingkat ketimpangan pembangunan. nilai signifikansi untuk variabel desentralisasi fiskal (X_2) adalah 0,000 dinyatakan lebih kecil dari taraf $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$) dan Nilai konstanta regresi desentralisasi fiskal sebesar 2,280 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% tingkat desentralisasi fiskal maka akan menyebabkan peningkatan tingkat ketimpangan sebesar 2,280. Arah hubungan antara desentralisasi dengan ketimpangan pembangunan adalah searah (+), dimana kenaikan nilai desentralisasi fiskal akan mengakibatkan peningkatan pula terhadap ketimpangan di kawasan mamminasata.

Desentralisasi Fiskal dengan Ketimpangan. Menurut penelitian yang dilakukan Akai dan Sakata (2005), desentralisasi fiskal merupakan sebagai alat yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi sektor publik dan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Akai dan Sakata (2005) menjelaskan pada sistem sentralistik pelaksanaan untuk mendistribusikan sumber daya daerah yang kaya ke daerah yang miskin dan dapat mengurangi kesenjangan, tetapi pada sistem otonomi daerah bukan berarti dampak kesenjangan sosial lebih besar dibanding sistem sentralistik, dalam sistem otonomi diharapkan daerah akan lebih intensif untuk memajukan daerahnya dengan melakukan kebijakan-kebijakan untuk pembangunan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rosdiana yang berjudul pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan ketimpangan, dimana desentralisasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan.

Tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lessmann yang berjudul desentralisasi fiskal dan ketimpangan regional, dalam penelitiannya Lessmann menemukan bahwa derajat dari desentralisasi yang tinggi menyebabkan rendahnya ketimpangan regional. Jadi wilayah-wilayah terbelakang atau miskin tidak akan dirugikan dari adanya desentralisasi fiskal begitupun sebaliknya.

c. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pembangunan

Hasil analisis data regresi variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel tingkat ketimpangan pembangunan. Nilai signifikansi untuk variabel tingkat pengangguran terbuka (X_3) adalah 0,110 dinyatakan lebih besar dari taraf $\alpha = 0,05$ ($0,110 > 0,05$) dan Nilai konstanta regresi Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0,013 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1% tingkat pengangguran terbuka maka akan menyebabkan peningkatan pula pada tingkat ketimpangan pembangunan di kawasan Mamminasata sebesar 0,013, begitu pula sebaliknya setiap penurunan 1% tingkat pengangguran terbuka maka akan menyebabkan penurunan pula pada tingkat ketimpangan pembangunan di kawasan Mamminasata sebesar 0,013 Arah hubungan antara Tingkat Pengangguran Terbuka dengan tingkat ketimpangan pembangunan yaitu searah (+), dimana kenaikan nilai tingkat pengangguran terbuka akan mengakibatkan peningkatan pula terhadap ketimpangan di kawasan mamminasata. Akan tetapi, variabel tingkat pengangguran tidak signifikan yaitu 0,110 dari taraf signifikan sebesar 0,05 artinya variabel tingkat pengangguran tidak mempengaruhi ketimpangan

pembangunan. Hal ini disebabkan tingkat pengangguran pada tiap Kabupaten/Kota di kawasan Mamminasata yang cukup rendah selama tahun penelitian.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ulfie (2014) dimana pengangguran berpengaruh positif, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa upah merupakan salah satu komponen dalam penghitungan pendapatan nasional. Apabila tingkat pengangguran semakin tinggi, maka nilai komponen upah akan semakin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional pun akan semakin kecil dan akan berdampak pada ketimpangan setaip daerahnya. Turunnya TPT diasumsikan semakin banyak faktor produksi yaitu tenaga kerja yang melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini pada akhirnya akan memberikan pemasukan kepada masyarakat. Menurunnya TPT juga mengindikasikan semakin banyaknya penerima pendapatan di masyarakat, meskipun gaji maupun upah yang diterima tidak sama di setiap daerah. Semakin banyaknya masyarakat yang bekerja dan menerima pendapatan diharapkan mampu memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan yang ada.

3. Hipotesis kuznet

Hipotesis Kuznets tentang kurva U terbalik terbukti tidak berlaku di kawasan mamminasata selama 2004sampai dengan 2015. Hal ini dapat dilihat dari hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan hasil dari indeks entropy theil menunjukkan bentuk kurva U (tidak terbalik). Pada pertumbuhan awal ketimpangan membaik dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan justru semakin meningkat, namun pada suatu waktu akan terjadi penurunan ketimpangan lagi dan akhirnya akan meningkat lagi

sehingga dapat dikatakan peristiwa tersebut seperti berulang kembali. Hal ini berkebalikan dengan Hipotesis Kuznets, maka dalam penelitian ini Hipotesis Kuznets tidak berlaku.

Dapat dikatakan bahwa di awal pembangunan diperlukan pertumbuhan yang tinggi (syarat perlu), setiap Kabupaten/Kota yang berada di kawasan Mamminasata berusaha untuk meningkatkan pertumbuhannya dengan mengandalkan sektor unggulan daerah, padahal kondisi antar Kabupaten/Kota di Kawasan Mamminasata umumnya tidak memadai dalam hal infrastruktur, kecuali daerah perkotaan, seperti Kota Makassar. Sedangkan Kabupaten lainnya di Kawasan Mamminasata mengandalkan sektor pertanian sebagai primadona sehingga pertumbuhannya pesat. Namun pesatnya pertumbuhan pada beberapa daerah tidak sebanding dengan kesejahteraan rakyat, di mana akses masyarakat dalam pelayanan publik masih sangat terbatas. Jika kita teliti, justru daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami kenaikan biasanya tidak stabil dalam pertumbuhannya, cenderung berfluktuatif sangat tajam. Jika Kabupaten/Kota telah berhasil mengoptimalkan potensinya, maka pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota tidak begitu mencolok perbedaannya termasuk dalam hal pendapatan perkapita antar daerah, dengan demikian ketimpangan semakin menyempit. Namun jika ada Kabupaten/Kota yang lebih cepat lagi dalam pertumbuhannya maka ketimpangan terjadi lagi sampai Kabupaten/Kota lain akan berusaha mengejar ketertinggalannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Besar tingkat ketimpangan pembangunan di Kawasan Mamminasata cukup tinggi karena mencapai angka 1 diukur dengan menggunakan Indeks Entropy Theil. Pada tahun 2006-2010 ketimpangan mengalami penurunan selanjutnya pada tahun 2011 ketimpangan melebar namun pada tahun selanjutnya ketimpangan mengalami penurunan kembali.
2. Secara simultan ada pengaruh signifikan dan berhubungan positif antara aglomerasi, desentralisasi fiskal dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di kawasan Mamminasata. Kemudian secara parsial aglomerasi dan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap tingkat ketimpangan pembangunan, sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan tetapi berhubungan positif terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di Kawasan Mamminasata.
3. Hipotesis Kuznet mengenai Kurva U-Terbalik tidak berlaku atau tidak terbukti di Kawasan Mamminasata. Pada pertumbuhan awal ketimpangan membaik dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan justru semakin meningkat. Namun, pada suatu

waktu akan terjadi penurunan ketimpangan dan akhirnya akan meningkat lagi sehingga dapat dikatakan peristiwa tersebut seperti berulang kembali. Hal ini berkebalikan dengan Hipotesis Kuznets, maka dalam penelitian ini Hipotesis Kuznets tidak berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Ketimpangan pembangunan di Kawasan Mamminasata termasuk dalam kategori yang sedang, oleh karena itu perlu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan ekonomi maupun nonekonomi yang saling mendukung agar ketimpangan pembangunan dapat membaik sehingga salah satunya terjadi pemerataan pendapatan.
2. Aglomerasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan di Kawasan Mamminasata, hal ini dikarenakan kegiatan ekonomi hanya terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu saja sehingga wilayah lain tetap terbelakang. Oleh karena itu diperlukan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan. Adanya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ini dapat memberikan dampak menyebar dan menghindari terpusatnya kegiatan ekonomi pada beberapa wilayah saja.
3. Otonomi daerah merupakan wewenang yang harus dijalankan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Usaha menciptakan sumber perekonomian

baru dan pembangunan infrastruktur penunjang otonomi daerah perlu dilakukan untuk mencapai kemandirian daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan di Kawasan Mamminasata. Sebab dengan adanya kewenangan tersebut, maka berbagai inisiatif dan aspirasi masyarakat untuk menggali potensi daerah akan dapat lebih digerakan dan jika hal ini dilaksanakan maka pembangunan akan dapat digerakan.

4. Untuk mengurangi jumlah pengangguran yang terus melebar maka dengan setiap peningkatan jumlah penduduk seharusnya diimbangi dengan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan.
5. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian yang telah penulis lakukan untuk melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan seperti inflasi, investasi dan tingkat pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Angelia, Yuki. Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 1995-2008. 2010. *Jurnal Universitas Diponegoro*

..... Lincolin. *Ekonomi Pembangunan*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta . 1997

....., Lincolin. *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta. 2010

..... Lincolin. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE Yogyakarta. 1999

Asih, Widi. Analisis Ketimpangan Dalam Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan Di Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2013. *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*.

Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. *Kota Makassar Dalam Angka, 2004-2013*.

Barry Poulson, W & Jules, Goden Kaplan. *State Income Taxes and Economic Growth*. Cato Journal. 2008

Bonet, Jaime. Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence From The Colombian Experience. Springer Verlag. 2006

Dewi. Ida Ayu. Analisis Ketimpangan Pembangunan Antara Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. 2011. *Jurnal Universitas Udayana*.

Efriza, Ulfie. Analisis Kesenjangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur di Era Desentralisasi Fiskal. 2014. *Jurnal Universitas Brawijaya Malang*.

Fitriani, Hofman dan Kaiser. In Diversity The Creation Of New Local Governments In A Decentralising Indonesia, The World Bank Jakarta. 2005.

Fitriya. L. Analisis Ketimpangan Pembangunan Daerah Serta hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakatdi Kawasan Gerbangkertosusila Provinsi Jawa Timur. 2011. *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*.

Halim, Abdul. Analisis Diskriptif Pengaruh Fiscal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. 2001. *Jurnal KOMPAK. STIE YO Yogyakarta*.

- Hartono. Budiartono. Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. 2005. *Jurnal Universitas Diponegoro*.
- Hessel, Nogi S. Tangkilisan. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo. 2007
- Hidayat. Muhammad Noor Sandi. Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Jawa Timur (Studi Kasus 38 Kab/Kota Di Jawa Timur. 2016. *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*.
- Jhingan M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Khusaini, Mohammad, *Ekonomi Publik- Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Malang, BPFE Universitas Brawijaya. 2006
- Kuncoro. Mudrajad. *Ekonomi Pembangunan*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta. 2006
- Mudrajad. *Ekonomika Indonesia; Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*, Yogyakarta, UPP STIEM YKPN. 2009
- Mudrajad. *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia. 2002
- Mudrajad. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi. Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga. 2004
- Kurniasih, Eni Panca. Ketimpangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat Suatu Kajian Terhadap Hipotesis Kuznets. 2013. *Jurnal Universitas Tnajung Pura Pontianak*.
- Mahi, Raksaka. Desentralisais fiskal dan Otonomi Daerah, Makalh disampaikan dalam kursus Reguler Angkatan XXXV, LEMHANAS, Jakarta. 2002
- Mankiw. *Teori Makro Ekonomi*. Penerbit Erlangga. Jakarta. 2003
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta. 2002.
- Mawhood P. *local Government In The Third World: The Experience Of Tropical Africa*. 1987

- Noviana, Devi. Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2014. *Jurnal Universitas Diponegoro*.
- Putri. Rizka Mardela Okta. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Lampung. 2016. *Jurnal*
- Rahmawati, Farida. Desentralisasi Fiskal, Konsep, Hambatan, Dan Prospek dalam Yustika, Ahmad Erani. 2008
- Saragih, Juli Panglima. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia. 2003.
- Sihombing. Kartini H. Pengaruh Aglomerasi. Modal. Tenaga Kerja dan Kepadatan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Demak. *Jurnal Tidak Dipublikasikan*. Fakultas Ekonomi Undip. Semarang. 2008.
- Sjafrizal. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2012
- *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Baduose Media. Padang Sumatera Barat. 2008.
- *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pres. 2014
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002
- Suprianik. Analisis Hipotesis Kuznets pada Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Regional Wilayah Eks-Karesidenan Besukji Jawa Timur Sebelum dan Sesudh Penerapan desentralisasi Fiskal di Indonesia. 2012. *Jurnal Universitas Jember*.
- Sutarno, dkk. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan Di Kabupaten Banyumas, 1993-2000. *Jurnal*
- Tarigan. Robinson. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara. Jakarta. 2007.
- *Perencanaan Pembangunan Wilayah (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004
- Todaro.M. dan Smith. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Pearson Education Limited. United Kingdom. 2004.

-, Michael P. dan Stephen C. Smith.. *Pembangunan Ekonomi* Edisi kesembilan Jilid 1. Devri Barnadi,dkk (Ed). Jakarta: Penerbit Erlangga. 2006
- Vibiz Economic Reseaerch Center. Efektifitas Faktor Input dan Ketimpangan Pendapatan Daerah setelah Desentralisasi Fiskal.
- Wibowo, Puji. *Mencermati dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Jurnal Keuangan Publik. 2008.
- Widiatri. Rimarti Anggun, dkk. Pengaruh Pembangunan Mamminasata Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Dan Ekologi Pada Masyarakat Lokal. 2014. *Jurnal Institut Pertanian Bogor*.





LAMPIRAN 1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

INDEKS ENTROPY THEIL

Kab/Kota	Tahun	PDRB perkapita Kab/Kota (Yi)	rata-rata PDRB perkapita mammina sata (Y)	jumlah penduduk kab/kota (Ni)	jumlah penduduk mammin asata (N)	Yi / Y	Ni / N	(Yi/y) / (Ni/N)	LOG (Yi/y) / (Ni/N)	(Yi / Y) * LOG (Yi/y) / (Ni/N)
M A K A S S A R	2004	8,409,375	4,059,270	1,164,380	2,264,387	2.0716	0.5142	4.0287	0.6051	1.2537
	2005	8,791,764	4,210,620	1,193,451	2,313,244	2.0879	0.5159	4.0471	0.6071	1.2677
	2006	9,321,459	4,440,770	1,216,746	2,345,186	2.0990	0.5188	4.0457	0.6070	1.2741
	2007	9,926,449	4,677,923	1,235,239	2,381,594	2.1219	0.5186	4.0912	0.6118	1.2983
	2008	10,809,844	5,002,819	1,253,656	2,417,897	2.1607	0.5184	4.1673	0.6198	1.3394
	2009	11,634,983	5,334,667	1,271,870	2,453,848	2.1810	0.5183	4.2078	0.6240	1.3611
	2010	12,140,808	5,507,153	1,338,663	2,580,209	2.2045	0.5188	4.2491	0.6283	1.3851
	2011	13,179,663	5,942,172	1,352,136	2,606,176	2.2179	0.5188	4.2750	0.6309	1.3994
	2012	14,297,586	6,363,403	1,369,606	2,640,506	2.2468	0.5186	4.3317	0.6366	1.4305
	2013	15,146,403	6,726,873	1,408,072	2,711,767	2.2516	0.5192	4.3363	0.6371	1.4346
	2014	57,791,322	29,380,806	1,429,242	2,757,986	1.9669	0.5182	3.7956	0.5792	1.1394
	2015	61,225,439	31,249,601	1,449,401	2,798,309	1.9592	0.5179	3.7826	0.5777	1.1320
M A R O S	2004	2,940,618	4,059,270	290,173	2,264,387	0.7244	0.1281	5.6531	0.7523	0.5450
	2005	2,969,133	4,210,620	296,336	2,313,244	0.7052	0.1281	5.5045	0.7407	0.5223
	2006	3,100,560	4,440,770	296,071	2,345,186	0.6982	0.1262	5.5305	0.7428	0.5186

	2007	3,203,689	4,677,923	299,662	2,381,594	0.6849	0.1258	5.4429	0.7358	0.5039
	2008	3,343,918	5,002,819	303,211	2,417,897	0.6684	0.1254	5.3301	0.7267	0.4858
	2009	3,513,279	5,334,667	306,687	2,453,848	0.6586	0.1250	5.2694	0.7218	0.4753
	2010	3,614,967	5,507,153	319,002	2,580,209	0.6564	0.1236	5.3093	0.7250	0.4759
	2011	3,849,934	5,942,172	322,212	2,606,176	0.6479	0.1236	5.2405	0.7194	0.4661
	2012	4,117,227	6,363,403	325,401	2,640,506	0.6470	0.1232	5.2503	0.7202	0.4660
	2013	4,388,036	6,726,873	331,796	2,711,767	0.6523	0.1224	5.3314	0.7268	0.4741
	2014	29,998,045	29,380,806	335,596	2,757,986	1.0210	0.1217	8.3908	0.9238	0.9432
	2015	32,216,486	31,249,601	339,300	2,798,309	1.0309	0.1213	8.5025	0.9295	0.9583
G O W A	2004	2,290,629	4,059,270	565,252	2,264,387	0.5643	0.2496	2.2606	0.3542	0.8007
	2005	2,379,815	4,210,620	575,295	2,313,244	0.5652	0.2487	2.2726	0.3565	0.8103
	2006	2,493,206	4,440,770	583,021	2,345,186	0.5614	0.2486	2.2584	0.3538	0.7990
	2007	2,596,750	4,677,923	594,423	2,381,594	0.5551	0.2496	2.2241	0.3471	0.7721
	2008	2,723,862	5,002,819	605,876	2,417,897	0.5445	0.2506	2.1728	0.3370	0.7323
	2009	2,886,941	5,334,667	617,317	2,453,848	0.5412	0.2516	2.1511	0.3327	0.7156
	2010	2,895,177	5,507,153	652,941	2,580,209	0.5257	0.2531	2.0774	0.3175	0.6596
	2011	3,149,718	5,942,172	659,512	2,606,176	0.5301	0.2531	2.0946	0.3211	0.6726
	2012	3,221,799	6,363,403	670,465	2,640,506	0.5063	0.2539	1.9940	0.2997	0.5976
	2013	3,357,359	6,726,873	691,309	2,711,767	0.4991	0.2549	1.9578	0.2918	0.5712

	2014	13,702,721	29,380,806	709,386	2,757,986	0.4664	0.2572	1.8132	0.2585	0.4686
	2015	14,364,202	31,249,601	722,702	2,798,309	0.4597	0.2583	1.7798	0.2504	0.4456
T A K A L A R	2004	2,596,458	4,059,270	244,582	2,264,387	0.6396	0.1080	5.9219	0.7725	0.4941
	2005	2,701,767	4,210,620	248,162	2,313,244	0.6417	0.1073	5.9812	0.7768	0.4984
	2006	2,847,855	4,440,770	249,348	2,345,186	0.6413	0.1063	6.0316	0.7804	0.5005
	2007	2,984,805	4,677,923	252,270	2,381,594	0.6381	0.1059	6.0237	0.7799	0.4976
	2008	3,133,652	5,002,819	255,154	2,417,897	0.6264	0.1055	5.9357	0.7735	0.4845
	2009	3,303,464	5,334,667	257,974	2,453,848	0.6192	0.1051	5.8903	0.7701	0.4769
	2010	3,377,659	5,507,153	269,603	2,580,209	0.6133	0.1045	5.8697	0.7686	0.4714
	2011	3,589,374	5,942,172	272,316	2,606,176	0.6041	0.1045	5.7810	0.7620	0.4603
	2012	3,817,000	6,363,403	275,034	2,640,506	0.5998	0.1042	5.7588	0.7603	0.4561
	2013	4,015,695	6,726,873	280,590	2,711,767	0.5970	0.1035	5.7694	0.7611	0.4544
	2014	16,031,135	29,380,806	283,762	2,757,986	0.5456	0.1029	5.3032	0.7245	0.3953
	2015	17,192,276	31,249,601	286,906	2,798,309	0.5502	0.1025	5.3659	0.7296	0.4014

LAMPIRAN 2



**PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 DAN 2010 TAHUN 2004 – 2015 KOTA
MAKASSAR, KABUPATEN MAROS, KABUPATEN GOWA, KABUPATEN TAKALAR
DAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

TAHUN	PDRB ADHK 2000 DAN 2010				PROV. SULSEL
	MAKASSAR	MAROS	GOWA	TAKALAR	
2004	9,791,709	853,288	1,294,783	635,047	44,744,533
2005	10,492,540	879,861	1,369,096	670,476	51,780,442
2006	11,341,848	917,986	1,453,592	710,107	60,902,824
2007	12,261,538	960,024	1,543,568	752,977	41,332,426
2008	13,551,827	1,013,913	1,650,323	799,564	44,549,825
2009	14,798,187	1,077,477	1,782,158	852,208	47,314,024
2010	16,252,451	1,153,182	1,890,380	910,627	171,740,744
2011	17,820,697	1,240,495	2,077,277	977,444	185,708,474
2012	19,582,060	1,339,750	2,153,399	1,049,805	202,184,588
2013	21,327,227	1,455,933	2,320,973	1,126,764	217,589,132
2014	82,597,786	10,067,224	9,720,519	4,549,027	233,988,051
2015	88,740,213	10,931,054	10,381,038	4,932,567	250,730,034

TAHUN	AGLOMERASI			
	MAKASSAR	MAROS	GOWA	TAKALAR
2004	0.218835874	0.019070218	0.028937234	0.014192728
2005	0.202635196	0.016992149	0.026440408	0.012948441
2006	0.186228606	0.015072963	0.023867399	0.011659673
2007	0.296656623	0.023226897	0.037345207	0.018217585
2008	0.304194846	0.022759080	0.037044433	0.017947635
2009	0.312765346	0.022772889	0.037666591	0.018011742
2010	0.094633636	0.006714668	0.011007173	0.005302335
2011	0.095960602	0.006679797	0.011185688	0.005263325
2012	0.096852387	0.006626371	0.010650658	0.00519231
2013	0.098016049	0.006691203	0.010666769	0.005178402
2014	0.353000017	0.043024522	0.041542801	0.019441279
2015	0.353927336	0.043596907	0.041403249	0.019672821

LAMPIRAN 3



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DESENTRALISASI FISKAL

Kab/Kota	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Penerimaan	Desentralisasi Fiskal
M A K A S S A R	2004	87,464,291,000	559,894,683,000	0.1562
	2005	100,645,767,000	608,709,054,000	0.1653
	2006	120,890,777,136	829,108,497,280	0.1458
	2007	136,619,097,085	941,668,824,309	0.1451
	2008	158,131,371,959	1,115,902,996,879	0.1417
	2009	169,889,013,768	1,215,460,818,849	0.1398
	2010	210,145,729,430	1,654,006,463,677	0.1271
	2011	345,350,562,825	1,883,077,957,274	0.1834
	2012	484,972,799,508	1,977,007,091,000	0.2453
	2013	621,247,679,844	1,991,712,003,000	0.3119
	2014	731,170,425,000	2,870,063,431,000	0.2548
	2015	992,147,612,000	2,952,609,910,737	0.3360
M A R O S	2004	14,917,301,000	232,467,582,000	0.0642
	2005	18,901,204,000	292,041,582,000	0.0647
	2006	20,082,025,000	349,183,951,000	0.0575
	2007	23,419,041,000	407,594,624,000	0.0575
	2008	27,163,518,000	464,737,130,000	0.0584
	2009	32,218,481,000	479,560,489,000	0.0672
	2010	39,531,091,000	500,121,349,000	0.0790
	2011	47,045,130,000	650,516,498,000	0.0723
	2012	60,364,409,000	931,492,367,000	0.0648
	2013	102,470,000,000	877,091,331,000	0.1168
	2014	118,267,910,000	996,256,583,000	0.1187
	2015	149,045,200,000	1,156,457,157,000	0.1289
	2004	19,973,125,000	278,743,449,000	0.0717

G O W A	2005	21,156,144,000	309,599,117,000	0.0683
	2006	35,703,518,000	484,601,856,000	0.0737
	2007	33,371,642,000	558,750,443,000	0.0597
	2008	40,098,127,000	622,517,356,000	0.0644
	2009	46,999,684,000	647,797,315,000	0.0726
	2010	54,812,691,000	726,563,085,000	0.0754
	2011	82,221,491,000	846,180,173,000	0.0972
	2012	91,927,510,000	921,069,186,000	0.0998
	2013	109,776,256,000	1,085,481,894,000	0.1011
	2014	149,352,694,000	1,240,560,247,000	0.1204
	2015	131,694,496,000	1,455,991,314,000	0.0905
T A K A L A R	2004	4,636,604,000	204,488,026,000	0.0227
	2005	6,850,962,000	256,955,267,000	0.0267
	2006	8,073,578,000	306,526,831,000	0.0263
	2007	9,395,475,000	363,382,269,000	0.0259
	2008	13,213,550,000	410,160,643,000	0.0322
	2009	13,776,416,000	414,450,422,000	0.0332
	2010	12,391,994,000	491,219,098,000	0.0252
	2011	14,837,501,000	500,509,786,000	0.0296
	2012	32,935,638,000	602,308,796,000	0.0547
	2013	39,668,045,000	663,341,982,000	0.0598
	2014	76,850,715,000	936,386,154,000	0.0821
	2015	97,971,287,000	911,306,497,000	0.1075

LAMPIRAN 4



**TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KOTA MAKASSAR, KABUPATEN
MAROS, KABUPATEN GOWA DAN KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2004 - 2015**

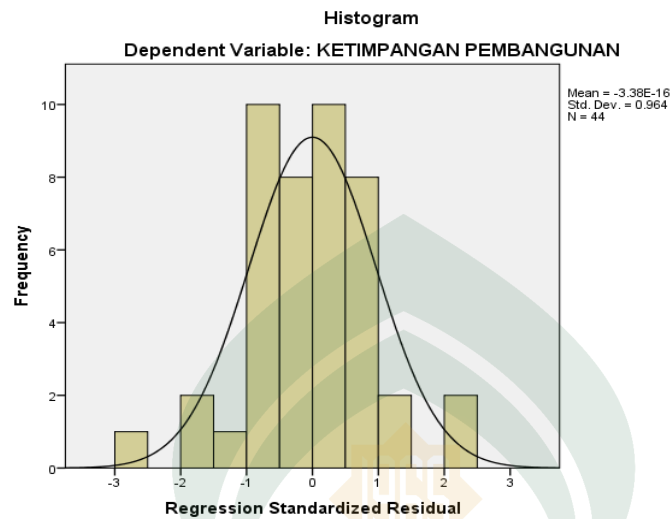
Tahun	TPT (Persen)			
	Makassar	Maros	Gowa	Takalar
2004	18,13	16,17	17,79	11,15
2005	15,04	14,61	15,33	9,97
2006	14,03	13,54	16,83	11,02
2007	18,00	12,20	13,00	12,40
2008	11,76	9,37	9,74	9,76
2009	12,90	11,60	9,60	9,20
2010	13,34	9,74	7,75	7,57
2011	8,41	6,94	7,05	5,54
2012	9,97	6,43	4,01	6,21
2013	9,53	5,71	2,63	2,73
2014	10,90	4,60	2,30	2,70
2015	11,28	4,98	3,09	3,21

LAMPIRAN 5

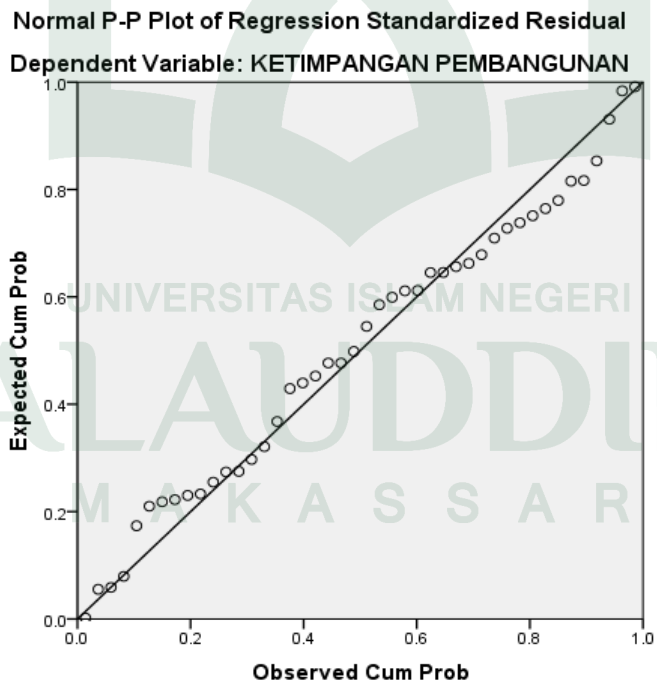


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HISTOGRAM



NORMAL P PLOT



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,17976579
	Absolute	,113
Most Extreme Differences	Positive	,113
	Negative	-,075
Kolmogorov-Smirnov Z		,786
Asymp. Sig. (2-tailed)		,568

UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Aglomerasi	.427	2.341
	Desentralisasi fiskal	.501	1.997
	Tingkat pengangguran terbuka	.748	1.338

a. Dependent Variabel: Ketimpangan Pembangunan
 Sumber : Output SPSS 21 (Data Sekunder, Diolah 2017)

UJI AUTOKORELASI

Model Summary^b

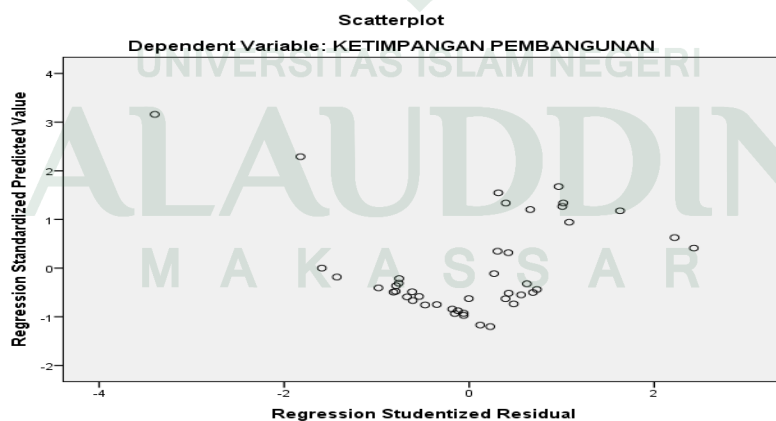
Model	Change Statistics		Durbin-Watson
	df2	Sig. F Change	
1	40	.000	.531

PERBAIKAN UJI AUTOKORASI

Model Summary^{c,d}

Model	Change Statistics		Durbin-Watson
	df2	Sig. F Change	
1	44	,000	1,598

UJI HETEROSKEDASTISITAS





LAMPIRAN 6

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HASIL REGRESI BERGANDA

Variabel	Koefisien Regresi	T hitung	Sig
	(B)		
(constant)	0,328	3,684	0,001
Aglomerasi	1,150	2,544	0,015
Desentralisasi fiskal	2,280	3,839	0,000
Tingkat pengangguran terbuka	0,013	1,636	0,110
R : 0,836			
R Square : 0,698			
F Hitung : 30,876			
Signifikansi F : 0,000			

LAMPIRAN 7



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Di Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar Tahun 2004 – 2015

Tahun	Makassar		Maros		Gowa		Takalar	
	PE	KP	PE	KP	PE	KP	PE	KP
2004	10,24	1,2537	2,17	0,5450	4,87	0,8007	4,47	0,4941
2005	7,16	1,2677	3,11	0,5223	5,74	0,8103	5,58	0,4984
2006	8,09	1,2741	4,33	0,5186	6,17	0,7990	5,91	0,5005
2007	8,11	1,2983	4,58	0,5039	6,19	0,7721	6,04	0,4976
2008	10,52	1,3394	5,61	0,4858	6,92	0,7323	6,19	0,4845
2009	9,20	1,3611	6,27	0,4753	7,99	0,7156	6,58	0,4769
2010	9,83	1,3851	7,03	0,4759	6,05	0,6596	6,85	0,4714
2011	9,65	1,3994	7,57	0,4661	6,20	0,6726	7,34	0,4603
2012	9,88	1,4305	8,00	0,4660	7,28	0,5976	7,40	0,4561
2013	8,91	1,4346	8,67	0,4741	7,78	0,5712	7,33	0,4544
2014	7,39	1,1394	5,23	0,9432	6,94	0,4686	9,00	0,3953
2015	7,44	1,1320	8,58	0,9583	6,80	0,4456	8,41	0,4014

Sumber : Data Sekunder Diolah Tahun 2017

PE : Pertumbuhan Ekonomi

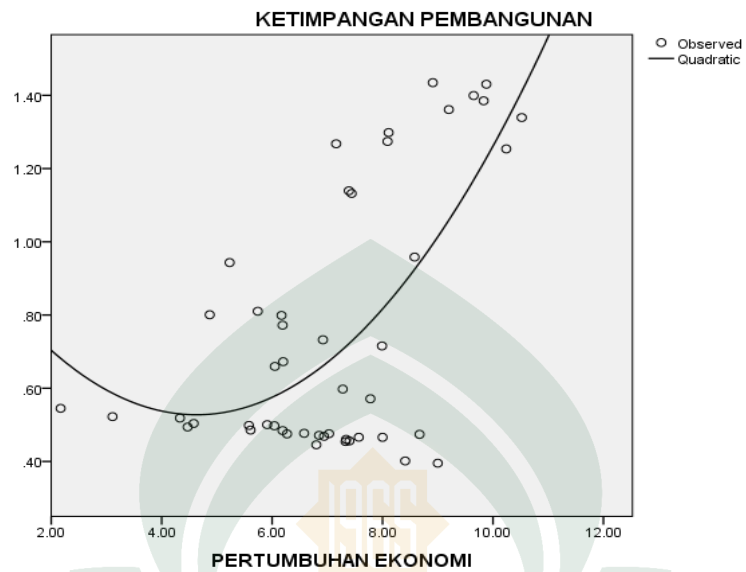
KP : Ketimpangan Pembangunan

Rata-Rata Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Di Kawasan Mamminasata Tahun 2004 – 2015

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Ketimpangan Pembangunan
2004	5,43	0,7733
2005	5,39	0,7746
2006	6,12	0,7730
2007	6,23	0,7679
2008	7,31	0,7605
2009	7,51	0,7572
2010	7,44	0,7480
2011	7,69	0,7496
2012	8,14	0,7375
2013	8,17	0,7335
2014	7,14	0,7366
2015	7,80	0,7343

Sumber : Data Sekunder Diolah Tahun 2017

Kurva Hubungan Antara indeks Entropy Theil dan Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Mamminasata



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama **Dwiyani Putri Lestari** atau biasa dipanggil Tari. Penulis dilahirkan di Makassar pada tanggal 23 Maret 1996, merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Ayahanda Didi Adiyanto dan Ibunda Sujiati Ningsih. Pendidikan Penulis dimulai pada tahun 2001 di Taman Kanak-Kanak (TK) Minasa Upa kemudian tahun 2002 penulis melanjutkan pendidikannya di SD Inpres Minasa Upa dan menyelesaikannya pada tahun 2007, setelah itu Penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Radiatul Adawiah Makassar dan di selesaikan pada tahun 2010, kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Makassar dan diselesaikan pada tahun 2013. Setelah melewati pendidikan menengah atas pada tahun 2013, Pada awal September 2013 telah tercatat sebagai mahasiswa disalah satu perguruan tinggi Negeri di Makassar yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tepatnya di Samata-Gowa dengan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Akhirnya Penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata 1 (satu) di Jurusan Ilmu Ekonomi pada tahun 2017.